KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/*TERM OF REFERENCE* (TOR)
Tahun Anggaran 2026

Instansi	**:**	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Bidang	:	Perlindungan Masyarakat
Seksi	:	Pelatihan dan Mobilisasi
Program	:	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Prioritas Daerah	:	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik
Kegiatan	:	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Sasaran Kegiatan	:	Presentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	:	Persentase penurunan jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalbar
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	:	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum lintas kabupaten/kota
Indikator KRO	:	Jumlah kegiatan fasilitasi dan pelatihan yang dilaksanakan
Rincian Output	:	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM Satlinmas lintas kabupaten/kota
Outcomes	:	Meningkatnya efektivitas penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum secara lintas daerah di Provinsi Kalimantan Barat melalui penguatan kapasitas SDM Satlinmas
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyaraka
Sasaran Sub Kegiatan	:	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya
Rincian Output Sub Kegiatan	:	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya sebanyak 120 Orang
Outcomes Sub Kegiatan	:	Meningkatnya kapasitas, profesionalisme, dan kesiapsiagaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam mendukung penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat secara lintas daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
Jumlah Anggaran	:	Rp. 287.448.000,-

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	JUMLAH ANGGARAN
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya sebanyak 120 Orang	Rp. 287.448.000,-

1. Latar Belakang

a) **Dasar Hukum**

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2oi8 Nomor 2);
f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934.)
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548)
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021

Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Sarana Dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Dan Satuan Pelindungan Masyarakat;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu;
o. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026;
p. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 44/SATPOLPP/2024 tentang Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.

b) **Gambaran Umum**

1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Satpol PP Provinsi secara konsisten mengembangkan program peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan Satlinmas. Sebagai salah satu elemen strategis perlindungan masyarakat, Satlinmas memiliki tugas penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum), membantu penanggulangan bencana, serta mendukung pengamanan pemilu dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Situasi geopolitik, dinamika sosial, dan potensi bencana di Kalimantan Barat terutama pada wilayah penyangga provinsi seperti Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah—memerlukan kesiapsiagaan personel Satlinmas yang profesional, disiplin, dan terlatih. Ketiga daerah ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, transportasi, serta pintu masuk keluar lintas kabupaten/kota maupun provinsi, sehingga memiliki tingkat kerawanan gangguan trantibum dan kebencanaan yang relatif tinggi.

2. Fokus dan Ruang Lingkup Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2026, kegiatan diarahkan pada peningkatan kualitas, kuantitas, dan sinergi antar Satlinmas melalui pelatihan, patroli wilayah, monitoring evaluasi (monev), serta pembinaan kelembagaan. Adapun ruang lingkup kegiatan meliputi:

a) Patroli Wilayah Dan Pengamanan Trantibum
Patroli wilayah dilakukan secara berkala dan insidental pada lokasi-lokasi strategis, khususnya di wilayah penyangga provinsi. Tujuannya adalah:
- Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan trantibum, seperti tawuran, unjuk rasa, konflik sosial, dan tindakan kriminalitas di kawasan padat aktivitas publik;
- Mengamankan objek vital dan ruang publik, termasuk terminal, pasar, fasilitas pemerintahan, dan jalur transportasi utama;
- Pengamanan kegiatan unjuk rasa dan aksi massa, baik yang berskala lokal maupun regional;
- Pelibatan anggota Satlinmas dalam operasi bersama dengan Satpol PP, TNI, Polri, dan unsur keamanan lainnya.

b) Monev Satgas Linmas Dan Pembinaan Kabupaten/Kota
Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan untuk:
- Menilai tingkat pembentukan dan efektivitas Satgas Linmas di tingkat Kabupaten/Kota, Satgas Linmas kecamatan dan Satlinmas desa/kelurahan;

- Mendorong percepatan pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa/kelurahan yang hingga saat ini belum memiliki kelembagaan secara formal, serta memperkuat dan mengefektifkan kelembagaan Satlinmas yang telah terbentuk namun belum optimal dalam struktur, fungsi, dan peranannya, guna menjamin kehadiran Satlinmas sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat di tingkat paling bawah;
- Memberikan rekomendasi peningkatan kapasitas kelembagaan Satlinmas dan dukungan sarana prasarana;
- Mengidentifikasi dan mengatasi kendala operasional Satlinmas di lapangan, seperti minimnya pelatihan, kurangnya koordinasi antar sektor, dan lemahnya pelibatan dalam kegiatan strategis.

c) Pembantuan Peningkatan Kapasitas Satlinmas
Melalui pendekatan kolaboratif, Satpol PP Provinsi memfasilitasi pelatihan teknis dan non-teknis untuk:
- Peningkatan kapasitas individu Satlinmas dalam hal komunikasi lapangan, kepemimpinan, mitigasi konflik, dan pertolongan pertama;
- Simulasi penanggulangan bencana, termasuk pelatihan evakuasi warga, pemadaman kebakaran ringan, dan logistik kebencanaan;
- Pelatihan penggunaan aplikasi Simlinmas untuk pencatatan dan pelaporan kegiatan.

d) Penanggulangan Dan Mitigasi Bencana
Satlinmas ditugaskan untuk:
- Tanggap terhadap bencana alam dan non-alam (banjir, kebakaran hutan dan lahan, bencana sosial);
- Membantu evakuasi, pertolongan pertama, hingga pemulihan pasca bencana;
- Bekerja sama dengan BPBD, Dinsos, PMI, Instansi Lainnya dan relawan dalam penanganan korban dan logistik.

e) Dukungan Sosial Kemasyarakatan Dan Pemerintahan
- Pelibatan Satlinmas dalam kegiatan pelayanan publik, seperti Posyandu, pengawalan kegiatan vaksinasi, upacara, dan agenda pembangunan daerah;
- Dukungan terhadap program Pemerintah Daerah di tingkat desa/kelurahan, termasuk kegiatan integratif lintas sektor.

3. Lokus Kegiatan Prioritas

Kegiatan difokuskan pada wilayah penyangga Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki intensitas aktivitas tinggi, potensi kerawanan trantibum, serta lalu lintas antar daerah yang padat:

a) Kota Pontianak
   - Sebagai ibu kota provinsi, dengan pusat pemerintahan, ekonomi, dan pergerakan masyarakat terbesar.
   - Lokasi strategis dalam pelaksanaan unjuk rasa, kegiatan sosial berskala besar, dan pusat TPS saat pemilu.

b) Kabupaten Kubu Raya
   - Berbatasan langsung dengan Kota Pontianak, menjadi jalur keluar masuk ke Bandara Supadio dan pelabuhan.
   - Sering terdampak bencana (banjir, kabut asap), serta rawan konflik sosial akibat kepadatan penduduk dan konflik lahan.

c) Kabupaten Mempawah
   - Wilayah pelabuhan dan transit logistik utama antar kabupaten dan antarprovinsi (arah ke Kalimantan Tengah).
   - Titik rawan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan ekonomi strategis yang berpotensi memicu konflik horizontal.

4. Sasaran Dan Outcome Kegiatan
   Sasaran Kegiatan:
   - 120 personel Satlinmas kabupaten/kota se-Kalimantan Barat;
   - Satlinmas desa/kelurahan yang belum aktif atau belum terbentuk;
   - Satgas Linmas tingkat kecamatan yang masih memerlukan dukungan pembentukan dan pelatihan;
   - Personel yang akan bertugas di TPS pada Pemilu 2024 tahap lanjutan (Pilkada serentak 2026).

   Outcome yang Diharapkan:
   - Terbentuknya Satlinmas yang siaga, kompeten, dan berdaya guna;
   - Meningkatnya kapasitas kelembagaan Satlinmas di tingkat desa dan kecamatan;
   - Penguatan koordinasi vertikal dan horizontal antara Satlinmas provinsi dan kabupaten/kota;
   - Terciptanya kondisi sosial yang tertib, aman, dan responsif terhadap bencana dan kerawanan sosial;
   - Integrasi tugas Satlinmas dengan layanan sosial seperti Posyandu, Simlinmas, dan perlindungan warga.

c) **Maksud dan Tujuan**

a. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bidang Perlindungan Masyarakat, untuk memperkuat sistem perlindungan masyarakat secara terpadu dan berjenjang, dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan.

Fokus utama diarahkan pada wilayah penyangga Ibu Kota Provinsi, yang secara geografis dan sosial memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi, pertumbuhan wilayah pesat, dan berpotensi mengalami kerawanan sosial, bencana, maupun konflik horizontal.

b. Tujuan:
   a. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas kelembagaan Satlinmas di seluruh tingkatan, melalui pembinaan dan fasilitasi pembentukan atau penguatan:
      1) Satgas Linmas Kabupaten/Kota, khususnya di wilayah strategis penyangga Provinsi Kalimantan Barat seperti Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah;
      2) Satgas Linmas Kecamatan, sebagai perpanjangan fungsi koordinatif dan operasional dalam respons ketertiban dan kedaruratan;
      3) Satlinmas Desa/Kelurahan, sebagai kekuatan perlindungan paling dekat dengan masyarakat dan garda terdepan dalam mendukung program-program pemerintah di tingkat lokal.
   b. Mendorong percepatan implementasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, terutama dalam aspek penataan struktur kelembagaan Satlinmas dan penguatan kapasitas personelnya.
   c. Membangun sinergi dan kolaborasi antara lintas pemangku kepentingan, meliputi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan), TNI/Polri, BPBD, dan instansi teknis lainnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Satlinmas secara terpadu dan responsif terhadap dinamika lokal.
   d. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan operasional personel Satlinmas dalam menghadapi berbagai bentuk potensi gangguan ketertiban umum, konflik sosial, bencana alam, dan kondisi darurat lainnya, melalui pelatihan, simulasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

e. Mendorong pengarusutamaan peran Satlinmas dalam kegiatan pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan, seperti pengamanan Posyandu, pelaksanaan Pilkada/Pemilu, kegiatan sosial keagamaan, penanggulangan bencana, dan partisipasi dalam forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).
f. Mengoptimalkan peran wilayah penyangga sebagai zona stabilitas sosial, dengan memperkuat kehadiran Satlinmas dalam menjaga harmoni sosial, deteksi dini gangguan ketertiban, serta sebagai pelindung dan pelayan masyarakat di tingkat paling bawah.
g. Menjadi wadah monitoring dan evaluasi kinerja Satlinmas secara menyeluruh, serta sebagai sarana untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan masing-masing wilayah.

d) **Alasan Kegiatan dilaksanakan**

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas, patroli wilayah, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan kelembagaan Satlinmas di wilayah penyangga Provinsi Kalimantan Barat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor strategis dan operasional sebagai berikut:

1) Meningkatnya Kompleksitas Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)
   - Wilayah penyangga seperti Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah memiliki tingkat mobilitas dan interaksi sosial yang tinggi, menjadikannya rentan terhadap gangguan Trantibum, seperti unjuk rasa, konflik sosial, dan kejahatan jalanan.
   - Ancaman gangguan Trantibum kerap muncul secara insidental dan cepat berkembang, membutuhkan deteksi dini serta respons cepat dari satuan di lapangan.
2) Tingginya Potensi Risiko Kebencanaan
   - Kalimantan Barat, khususnya di wilayah penyangga, merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta bencana sosial lainnya.
   - Diperlukan keberadaan personel Satlinmas yang terlatih dan siaga untuk mendukung penanggulangan dan mitigasi bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
3) Masih Terbatasnya Kelembagaan dan Kapasitas Satlinmas
   - Masih terdapat desa/kelurahan yang belum memiliki Satlinmas secara formal, dan di daerah yang sudah terbentuk pun seringkali kelembagaannya belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pembinaan berkelanjutan.
   - Perlu percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan Satlinmas agar mampu berfungsi secara efektif sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat.
4) Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pelayanan Dasar Minimal (SPM)
   - Kegiatan ini merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.
   - Kegiatan ini juga mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024–2026, serta perwujudan visi pembangunan daerah yang aman, tertib, dan tanggap terhadap bencana.

Sebagai pelaksana urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menindaklanjuti amanat Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, yang memuat ketentuan pembentukan struktur Satlinmas secara hierarkis dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan. Namun, hingga kini masih

banyak daerah di Kalimantan Barat yang belum optimal dalam melaksanakan regulasi ini. Beberapa permasalahan yang mengemuka antara lain:

- Belum terbentuknya Satgas Linmas Kabupaten/Kota, Satgas Linmas Kecamatan maupun Satlinmas Desa/Kelurahan secara resmi dan fungsional;
- Lemahnya struktur dan kepemimpinan Satgas Linmas Kecamatan;
- Ketidakterpaduan data dan keberadaan Satlinmas di tingkat desa/kelurahan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia;
- Ketiadaan rencana pembinaan terpadu dan sistematis dari provinsi ke kabupaten/kota hingga desa.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab *gap implementasi regulasi* tersebut sekaligus mendorong terbangunnya sistem pelindungan masyarakat yang terstruktur, terorganisir, dan terlatih di seluruh wilayah penyangga.

1) Dinamika Sosial Wilayah Penyangga yang Kompleks dan Berkembang Pesat

   Sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi, wilayah seperti Kubu Raya, Mempawah, dan sebagian besar kawasan urban Pontianak mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang sangat tinggi. Kondisi ini melahirkan tantangan ketenteraman dan keamanan seperti:

   - Kepadatan penduduk yang memicu gesekan sosial dan konflik horizontal**;**
   - Maraknya permukiman kumuh dan rentan kebakaran**;**
   - Peningkatan angka kriminalitas jalanan dan konflik remaja**;**
   - Kerentanan terhadap banjir, cuaca ekstrem, dan bencana lainnya**;**
   - Tingginya potensi gangguan selama tahun politik atau pelaksanaan pesta demokrasi**.**

   Di tengah keterbatasan jumlah dan daya jangkau aparat formal seperti Polri atau TNI, maka kehadiran Satlinmas yang siaga dan memahami karakteristik lokal menjadi kebutuhan mutlak untuk memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

2) Kesenjangan Kelembagaan dan Kapasitas Linmas di Daerah

   Hasil monitoring dan supervisi menunjukkan bahwa:

   - Di sebagian besar kabupaten/kota belum terdapat struktur formal Satgas Linmas Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak koordinasi perlindungan masyarakat;
   - Di level kecamatan, banyak Satgas Linmas Kecamatan belum aktif, atau bahkan belum dibentuk, akibat belum adanya panduan teknis dan penganggaran yang memadai;
   - Di level desa/kelurahan, keberadaan Satlinmas cenderung bersifat seremonial, tanpa pembinaan berkelanjutan, tanpa tugas yang jelas, dan tanpa integrasi dalam sistem penanganan gangguan trantibum.

     Kegiatan ini diharapkan menjadi intervensi kelembagaan yang komprehensif, yang tidak hanya fokus pada pelatihan SDM tetapi juga pada pembentukan struktur, penguatan peran, dan integrasi sistem kerja lintas level pemerintahan.

3) Mewujudkan Sistem Perlindungan Berbasis Masyarakat yang Responsif dan Siaga Bencana

   Perubahan iklim dan dinamika lingkungan di Kalbar telah meningkatkan frekuensi kejadian bencana seperti banjir, kebakaran permukiman, dan angin puting beliung. Desa dan kelurahan menjadi titik rawan yang paling terdampak.

   Tanpa kehadiran Satlinmas yang tangguh dan terlatih dalam evakuasi, pertolongan pertama, serta komunikasi kebencanaan, maka respons pemerintah akan sangat lambat dan berisiko menimbulkan korban jiwa serta kerusakan lebih besar.

   Dengan adanya kegiatan ini, anggota Satlinmas dan Satgas Linmas akan:

   - Dibekali dengan kemampuan dasar penanggulangan bencana;
   - Diposisikan sebagai mitra utama BPBD, PMI, dan Dinas Sosial di lapangan;

- Membentuk jejaring siaga berbasis RT/RW yang memperkuat ketahanan lokal.

4) Penguatan Ketahanan Sosial dan Stabilitas Wilayah Provinsi

Satlinmas sebagai bagian dari sistem pertahanan sipil berperan menjaga ketertiban dan stabilitas dari bawah. Di wilayah penyangga, yang merupakan jalur masuk dan keluar utama mobilitas penduduk dan barang, gangguan ketertiban kecil dapat merambat menjadi gangguan stabilitas regional.

Satgas Linmas yang aktif di kabupaten/kota dan kecamatan dapat berfungsi sebagai filter awal untuk meredam konflik sosial, mengawasi mobilitas massa, hingga mendukung kegiatan pengamanan pada momen-momen strategis seperti:

- Pemilihan Kepala Desa;
- Hari-hari besar keagamaan dan nasional;
- Demo atau aksi unjuk rasa masyarakat;
- Kegiatan pelayanan publik massal seperti vaksinasi, distribusi bantuan, atau penanganan PMKS.

Dengan demikian, kegiatan ini akan menjadi bagian penting dari arsitektur stabilitas sosial wilayah Kalimantan Barat.

5) Optimalisasi Peran Satlinmas dalam Mendukung Layanan Publik di Tingkat Lokal

Di tengah meningkatnya peran desa dan kelurahan sebagai pusat layanan masyarakat (termasuk Posyandu, PKK, dan pelayanan sosial lainnya), Satlinmas dapat berfungsi:

- Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelayanan berlangsung;
- Mengedukasi masyarakat dalam hal disiplin protokol layanan publik;
- Menjadi penghubung informasi antara warga dan pemerintah desa.

Melalui kegiatan ini, Satlinmas dapat diberdayakan secara nyata dan diberi peran taktis dalam mendukung fungsi pemerintah desa/kelurahan, sehingga tidak lagi dianggap sebagai “pasukan cadangan yang pasif”.

6) Mendorong Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Tingkat Pemerintahan

Kegiatan ini juga merupakan medium untuk membangun koordinasi lintas level, khususnya:

- Antara Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kabupaten/Kota;
- Antara pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan dalam urusan pembinaan Satlinmas;
- Antara pemerintah daerah dan lembaga keamanan (TNI/Polri), BPBD, serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam penanganan darurat.

Kegiatan ini akan membuka ruang kolaborasi dan memastikan bahwa peran Satlinmas dan Satgas Linmas terintegrasi dalam sistem perlindungan masyarakat daerah secara berkelanjutan.

e) **Dampak Negatif Jika Tidak Dilaksanakan:**

Kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan Satlinmas memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah. Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka akan timbul berbagai dampak negatif yang signifikan, baik secara kelembagaan, sosial, maupun terhadap pencapaian kinerja daerah.

1) Rendahnya Kesiapsiagaan dan Kapasitas Anggota Satlinmas
   - Tanpa pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembinaan, anggota Satlinmas di tingkat desa/kelurahan akan kekurangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang dibutuhkan dalam menghadapi tugas-tugas di lapangan, terutama dalam penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta bantuan penanganan bencana.
   - Hal ini akan berdampak pada minimnya profesionalitas dan reaktivitas Satlinmas dalam situasi darurat, yang berisiko memperbesar dampak sosial, ekonomi, dan keamanan bagi masyarakat.

2) Terhambatnya Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota dan Kecamatan
   - Tidak adanya fasilitasi dari Pemerintah Provinsi akan menyebabkan lambannya realisasi pembentukan Satgas Linmas di kabupaten/kota dan Satgas Linmas Kecamatan, yang menjadi salah satu amanat dari Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.
   - Daerah yang belum membentuk Satgas Linmas akan kesulitan mengoordinasikan anggota Satlinmas dalam skala luas, baik dalam konteks penanganan gangguan sosial maupun kegiatan kemasyarakatan strategis.
3) Lemahnya Sinergi Antarinstansi dan Antarlevel Pemerintahan
   - Kegiatan ini memiliki fungsi penting sebagai wadah koordinasi antara perangkat daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum, serta instansi terkait seperti BPBD, Dinas Sosial, TNI, Polri, dan unsur pemerintah desa/kelurahan.
   - Tanpa forum fasilitasi ini, akan terjadi tumpang tindih tugas, lemahnya alur komando, serta tidak sinkronnya langkah-langkah perlindungan masyarakat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
4) Menurunnya Partisipasi Satlinmas dalam Program Lintas Sektor seperti Posyandu dan Ketahanan Sosial
   - Satlinmas juga memiliki fungsi pendukung dalam kegiatan pelayanan dasar masyarakat seperti Posyandu, pelayanan kesehatan, dan ketahanan sosial di kelurahan.
   - Ketiadaan pembinaan dan sinergi lintas program akan membuat potensi ini tidak tergarap, yang pada akhirnya memperlemah daya dukung sosial Satlinmas terhadap pembangunan berbasis masyarakat.
5) Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Aparat Perlindungan Masyarakat
   - Masyarakat akan merasakan langsung dampak dari tidak berfungsinya Satlinmas secara maksimal di lingkungan mereka, seperti lambatnya penanganan gangguan lingkungan, kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta tidak adanya respons cepat dalam keadaan darurat.
   - Hal ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran pemerintah dalam melindungi, melayani, dan memberdayakan mereka secara nyata.
6) Gagalnya Pencapaian Target Kinerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   - Tanpa kegiatan ini, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat tidak dapat tercapai.
   - Hal ini akan berdampak pada penilaian kinerja pemerintah daerah, termasuk evaluasi dari inspektorat dan Kementerian Dalam Negeri, serta berisiko terhadap pengurangan dukungan dana dekonsentrasi atau Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik.
7) Meningkatnya Risiko Konflik Sosial dan Kerawanan Wilayah
   - Daerah-daerah dengan potensi konflik sosial, perbatasan, atau dengan keanekaragaman budaya dan etnisitas seperti di Kalimantan Barat, sangat membutuhkan kehadiran Satlinmas yang sigap dan berwawasan lokal.
   - Tanpa pembinaan dan fasilitasi rutin, wilayah-wilayah tersebut akan menjadi lebih rentan terhadap konflik horizontal, gangguan SARA, perusakan fasilitas umum, serta potensi mobilisasi massa liar yang dapat mengancam stabilitas daerah.
8) Tidak Tersalurkannya Aspirasi dan Kebutuhan Satlinmas Daerah
   - Kegiatan fasilitasi juga menjadi sarana untuk menjaring aspirasi, kendala operasional, dan kebutuhan Satlinmas di tingkat kabupaten/kota dan desa.

- Jika kegiatan tidak dilaksanakan, akan terjadi miskomunikasi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam hal kebijakan, dukungan anggaran, distribusi atribut dan sarana-prasarana Satlinmas, serta pembaruan regulasi teknis.

f) **Penerima Manfaat**

Kegiatan peningkatan kapasitas dan pembinaan kelembagaan Satlinmas yang dilaksanakan di wilayah penyangga Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk memperkuat peran serta fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Melalui kegiatan ini, berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat strategis yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan responsif terhadap berbagai tantangan sosial dan kebencanaan.

Manfaat dari kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh personel Satlinmas sebagai pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga oleh pemerintah daerah, lembaga pelayanan publik, serta masyarakat luas. Peningkatan kapasitas, pemahaman regulasi, dan penguatan kelembagaan menjadi fondasi penting dalam menciptakan sinergi antarinstansi dan optimalisasi peran Satlinmas dalam mendukung pelayanan publik dan perlindungan sosial di daerah.

Berikut disajikan rincian penerima manfaat kegiatan ini, jenis manfaat yang diperoleh, serta penjelasan dampak positifnya terhadap penyelenggaraan ketertiban dan perlindungan masyarakat:

Tabel Penerima Manfaat
Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Satlinmas

No.	Penerima Manfaat	Jenis Manfaat	Penjelasan Manfaat
1.	Personel Satlinmas (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota)	- Peningkatan kapasitas dan kompetensi - Peningkatan kesiapsiagaan dan profesionalisme	Satlinmas memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru melalui pelatihan teknis dan non-teknis, termasuk penggunaan Aplikasi Simlinmas, penanggulangan bencana, pengamanan kegiatan, serta pelayanan masyarakat sehingga lebih siap dan profesional dalam menjalankan tugas.
2.	Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan	- Penguatan kelembagaan Linmas - Dukungan terhadap layanan publik dan keamanan lingkungan	Keberadaan Satlinmas yang aktif dan terlatih membantu dalam menjaga keamanan kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat seperti Posyandu, pemilu/pilkada, serta membantu dalam penanganan situasi darurat di tingkat lokal.
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi	- Efektivitas penyelenggaraan trantibum - Implementasi kebijakan secara optimal	Membantu pemda dalam mewujudkan sistem perlindungan masyarakat yang kuat dan terkoordinasi, mendukung pelaksanaan Permendagri No. 26 Tahun 2020 serta memperkuat sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam hal

No.	Penerima Manfaat	Jenis Manfaat	Penjelasan Manfaat
			pembinaan dan pengendalian Linmas.
4.	Masyarakat Umum	- Rasa aman dan nyaman - Perlindungan di wilayah rawan gangguan	Masyarakat memperoleh rasa aman melalui kehadiran Satlinmas yang siaga dan responsif terhadap potensi gangguan ketertiban, bencana, dan konflik sosial, terutama di wilayah padat penduduk, pusat kegiatan, dan daerah rawan.
5.	Lembaga Layanan Sosial dan Kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Dinas Sosial, dll)	- Dukungan operasional lapangan - Kelancaran kegiatan pelayanan sosial	Satlinmas membantu pengamanan dan pengawalan kegiatan pelayanan publik seperti Posyandu, vaksinasi, dan distribusi bansos sehingga kegiatan berjalan lancar, aman, dan tertib, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
6.	BPBD, TNI/Polri, dan Instansi Keamanan Terkait	- Mitra operasional lapangan - Sinergi dalam penanganan bencana dan pengamanan	Satlinmas menjadi mitra strategis yang siap diterjunkan dalam kegiatan tanggap darurat, evakuasi, pengamanan acara, serta kegiatan patroli dan pemantauan wilayah, sehingga memperkuat kolaborasi dan efektivitas lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah.

1. Strategi Pencapaian Keluaran

Strategi pencapaian keluaran kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di kabupaten/kota penyangga Provinsi Kalimantan Barat agar mampu menjalankan perannya secara efektif dan profesional, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta mendukung layanan publik berbasis wilayah seperti Posyandu. Strategi ini disusun dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, yang melibatkan penguatan regulasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem informasi, serta peningkatan sinergi lintas sektor baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

a) Strategi Umum

1. Pendekatan Integratif dan Partisipatif
   Strategi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa/kelurahan, camat, dinas teknis, BPBD, Dinas Kesehatan, dan lembaga kemasyarakatan seperti kader Posyandu.
2. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
   Dorongan pembentukan regulasi daerah (SK Bupati/Wali Kota, Peraturan Desa, SK Camat/Lurah) menjadi prioritas utama untuk melegitimasi keberadaan dan peran Satlinmas serta Satgas Linmas.

3. Pengembangan Kapasitas Satlinmas
   Pelatihan teknis dan substantif bagi anggota Satlinmas, perangkat kelurahan, dan petugas teknis dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapsiagaan personel dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat.
4. Digitalisasi Manajemen Satlinmas melalui Aplikasi Simlinmas
   Penerapan teknologi informasi difokuskan untuk mempercepat pemetaan anggota Satlinmas, wilayah tugas, serta pelaporan kegiatan secara real-time melalui Aplikasi Simlinmas.
5. Monitoring Berbasis Evaluasi Kolaboratif
   Pemantauan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan mengintegrasikan evaluasi lapangan, umpan balik dari pemerintah daerah, serta analisis data berbasis Simlinmas sebagai dasar perbaikan program.

b) Strategi Teknis Operasional

1) **Tahapan Perencanaan**

Tahapan	**Uraian Strategis**
1. Identifikasi Daerah Prioritas	Pemilihan kabupaten/kota penyangga berdasarkan kriteria strategis seperti kedekatan geografis dengan ibukota provinsi, jumlah anggota Satlinmas aktif, dan status pembentukan Satgas Linmas.
2. Analisis Situasi dan Pemetaan	Pemetaan kapasitas kelembagaan, regulasi eksisting, jumlah personel, dukungan anggaran daerah, dan potensi integrasi program Satlinmas dengan kegiatan lainnya.
3. Konsolidasi dan Koordinasi Awal	Penguatan komitmen dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, camat, dan lurah/kades dalam mendukung pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif dan terstruktur.
4. Penyusunan Rencana Operasional	Perumusan desain kegiatan mencakup jadwal pelaksanaan, metode, materi pelatihan, narasumber, alokasi anggaran, hingga pengukuran indikator kinerja.
5. Persiapan Teknis dan Logistik	Penyiapan SDM fasilitator, perangkat kegiatan, bahan ajar, akun Simlinmas, serta dukungan logistik yang diperlukan di masing-masing lokasi pelaksanaan.

2) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan	**Deskripsi Kegiatan**
1. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan	Penyampaian arah kebijakan dan dasar hukum Permendagri No. 26 Tahun 2020 dan Permendagri No. 13 Tahun 2024 kepada pemda, camat, desa/kelurahan, serta perangkat terkait.
2. Bimbingan Teknis Satlinmas	Pelatihan teknis tentang tugas, fungsi, serta peran strategis Satlinmas dalam mendukung ketertiban umum, penanggulangan bencana, serta integrasi dengan Posyandu.
3. Workshop Simlinmas dan Data Entry	Pelatihan penggunaan Aplikasi Simlinmas, verifikasi dan entri data anggota Satlinmas, serta pelatihan pelaporan kegiatan secara digital.
4. FGD Kolaboratif Lintas Sektor	Diskusi terfokus untuk menyusun peta jalan integrasi Satlinmas dengan layanan Posyandu, forum KSB, dan kegiatan masyarakat lainnya, bersama mitra sektor teknis dan sosial.
5. Pendampingan Pembentukan Satgas	Asistensi langsung pembentukan Satgas Linmas kecamatan atau desa, penyusunan SK, penetapan wilayah tugas, dan pembagian peran antar anggota.

3) Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Tahapan	Uraian Aktivitas Evaluatif
1. Monitoring Pelaksanaan	Pengumpulan data dan observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan, keterlibatan peserta, serta keberfungsian kelembagaan Satlinmas di lokasi sasaran.
2. Evaluasi Proses dan Output	Penilaian terhadap kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan, termasuk efektivitas metode, kualitas fasilitator, dan kepuasan peserta.
3. Evaluasi Dampak Awal	Identifikasi perubahan perilaku kelembagaan, perbaikan struktur organisasi, dan peningkatan kolaborasi Satlinmas dengan program lain di tingkat lokal.
4. Laporan dan Rekomendasi	Penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi strategis bagi kelanjutan program dan replikasi kegiatan di wilayah lainnya di Kalimantan Barat.

4) Tahapan Tindak Lanjut dan Keberlanjutan

Tahapan	Strategi Tindak Lanjut
1. Diseminasi Hasil dan Praktik Baik	Penyampaian hasil kegiatan dan praktik baik ke forum OPD, camat, dan kepala desa/lurah sebagai dasar penyusunan kebijakan replikasi di wilayah lain.
2. Penguatan Platform Simlinmas	Perluasan fitur, pembaruan data, serta pelatihan lanjutan pemanfaatan Simlinmas agar menjadi alat kontrol dan evaluasi berbasis data Satlinmas daerah.
3. Integrasi dalam Rencana Kegiatan OPD	Penyelarasan program Satlinmas dalam Renja Satpol PP, BPBD, Dinkes, dan kecamatan/desa agar menjadi bagian dari rencana pembangunan berbasis wilayah.
4. Pengembangan Model Sinergi Wilayah	Penyusunan model integrasi Satlinmas–Posyandu–KSB berbasis kelurahan/desa sebagai program unggulan Satpol PP Provinsi Kalbar.

5) Indikator Keberhasilan Strategi

Indikator	Target
Persentase kabupaten/kota penyangga yang difasilitasi	≥ 100% dari target daerah prioritas
Jumlah Satgas Linmas terbentuk	4 Satgas/kecamatan atau desa di wilayah sasaran
Data Simlinmas yang terverifikasi dan aktif	≥ 80% anggota Satlinmas di lokasi kegiatan
Jumlah peserta bimtek yang dinyatakan kompeten	≥ 90% peserta yang mengikuti penuh rangkaian kegiatan
Terbitnya SK dan regulasi lokal Satlinmas	≥ 50% kecamatan/desa sasaran menerbitkan regulasi pendukung
Tingkat integrasi dengan Posyandu/KSB	≥ 20% lokasi kegiatan menunjukkan kerja sama antar sektor

a. **Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

NO	KEGIATAN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Identifikasi dan seleksi wilayah prioritas												
2	Koordinasi awal dan advokasi kebijakan daerah												
3	Penyusunan rencana teknis dan logistik kegiatan												
4	Persiapan teknis: modul, Simlinmas, narasumber												
5	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi (bimtek, FGD, workshop)												
6	Pendampingan pembentukan Satgas Linmas daerah												
7	Verifikasi dan input data anggota di Aplikasi Simlinmas												
8	Pemantauan dan evaluasi kegiatan di daerah												
9	Penyusunan laporan dan rekomendasi hasil kegiatan												
10	Diseminasi praktik baik dan replikasi kegiatan												

b. Instansi Yang Akan Di Libatkan
Berikut adalah nama instansi dan perannya dalam mendukung Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kalimantan Barat:

Tabel Instansi Pendukung
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Nama Instansi	Peran	Keterangan	Manfaat yang Diperoleh
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penentu arah kebijakan, pembina dan pengawas	Memberikan regulasi, dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor	Terwujudnya stabilitas daerah, efektivitas program lintas kabupaten/kota
2.	Pemerintah Kota Pontianak	Pelaksana program di tingkat kota	- Menyusun dan melaksanakan program pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kota - Penguatan kapasitas Satlinmas desa dan pengembangan sinergi kelembagaan - Mengoptimalkan koordinasi kecamatan dan desa dalam kegiatan Linmas	- Peningkatan ketertiban dan keamanan wilayah perkotaan - Ketertiban umum meningkat, respons bencana lebih terorganisasi - Terciptanya kesiapansiagaan desa dalam gangguan ketertiban dan bencana
3.	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Pelaksana program di tingkat kabupaten		
4.	Pemerintah Kabupaten Mempawah	Pelaksana program tingkat kabupaten		
5.	Satpol PP Provinsi Kalbar	Penanggung jawab teknis pembinaan Linmas	Membina, memfasilitasi, mengevaluasi kinerja Satlinmas dan Satgas Linmas kabupaten/kota	Peningkatan efektivitas peran Satpol PP sebagai pelindung masyarakat
6.	Satpol PP Kota Pontianak	Pelaksana teknis pembinaan Linmas kota	- Menyusun rencana kegiatan, pelatihan, serta pengawasan Linmas kelurahan - Melakukan koordinasi lintas desa, pelatihan dan pemantauan kinerja Linmas - Menyusun kebijakan teknis, logistik, serta pelatihan Linmas	- Dukungan terhadap keamanan wilayah dan penguatan kapasitas SDM - Peningkatan kapasitas aparatur dan penurunan risiko konflik sosial - Satpol PP makin solid dan operasional
7.	Satpol PP Kabupaten Mempawah	Pelaksana teknis Pembinaan kabupaten		
8.	Satpol PP Kabupaten Kubu Raya			

No	Nama Instansi	Peran	Keterangan	Manfaat yang Diperoleh
				Satlinmas makin responsif
9.	BPBD Provinsi Kalbar	Mitra dalam penanggulangan bencana	Menyediakan pelatihan mitigasi dan tanggap darurat bagi Linmas	Penguatan sinergi penanganan bencana berbasis masyarakat
10.	BPBD Kota Pontianak	- Pendukung peningkatan kesiapsiagaan - Mitra dalam pelatihan tanggap darurat - Pendamping kesiapsiagaan bencana desa	- Mengintegrasikan Linmas dalam sistem penanggulangan bencana kota - Kolaborasi dalam kegiatan edukasi dan simulasi penanganan bencana - Fasilitasi Linmas untuk pelatihan dan peningkatan pemahaman risiko	- Resiliensi kota dalam menghadapi bencana meningkat - Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana membaik - Terbangunnya sistem peringatan dini berbasis komunitas
11.	BPBD Kabupaten Mempawah			
12.	BPBD Kabupaten Kubu Raya			
13.	Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota	Integrator program ke dalam perencanaan daerah	Menyelaraskan program Linmas ke dalam RKPD dan Renstra	Program Linmas memiliki legitimasi dan dukungan anggaran
14.	Dinas PMD Provinsi Kalbar	Pembina kelembagaan masyarakat	Integrasi Linmas dalam penguatan lembaga kemasyarakatan desa	Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan fungsi Linmas
15.	Dinas PMD Kabupaten Mempawah	Mitra pemberdayaan desa	- Memperkuat Linmas dalam kegiatan sosial, budaya, dan keamanan - Pembinaan Linmas melalui pendekatan partisipatif dan inklusif	- Keamanan dan kebersamaan masyarakat desa meningkat - Peningkatan kepedulian sosial dan keterlibatan masyarakat
16.	Dinas PMD Kabupaten Kubu Raya			
17.	Dinas Kominfo Provinsi Kalbar	Media informasi dan dokumentasi	Sosialisasi program dan capaian melalui berbagai platform	Meningkatkan kesadaran publik dan dukungan masyarakat
18.	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan	Pendukung perlindungan sosial dan kebencanaan	Memberikan perlindungan sosial bagi korban bencana dan mendukung peran sosial Satlinmas	Meningkatkan jejaring sosial dan daya dukung penanganan kerawanan sosial dan bencana

No	Nama Instansi	Peran	Keterangan	Manfaat yang Diperoleh
	Kabupaten Mempawah			
19.	TNI/ Polri	Mitra keamanan dan ketertiban	Mendukung kegiatan pembinaan, pengamanan, dan pelatihan bersama Linmas	Meningkatkan sinergi keamanan dan stabilitas wilayah
20.	Kecamatan, Desa/Kelurahan	Pelaksana lapangan	Mengorganisir Linmas dan kegiatan ketenteraman tingkat lokal	Memperoleh dukungan koordinasi dan peningkatan kapasitas Linmas
21.	Satgas Linmas Prov/Kab/Kota	Fasilitator pembinaan dan monitoring	Mendampingi pembentukan dan evaluasi Satlinmas	Peran strategis dalam penguatan kelembagaan dan pelaporan
22.	Satgas Linmas Kecamatan	Koordinator teknis Linmas desa	Menyampaikan arahan teknis dan memastikan operasional Linmas	Peningkatan sistem koordinasi lapangan
23.	Satlinmas Desa/Kelurahan	Sasaran utama pembinaan	Menerima pelatihan, perlengkapan, dan penugasan operasional	Peningkatan keterampilan, kesiapsiagaan, dan kepercayaan diri
24.	Masyarakat	Penerima manfaat langsung	Mendapatkan rasa aman, ketertiban, dan perlindungan saat bencana	Lingkungan lebih tertib, aman, dan tanggap terhadap kondisi darurat
25.	Media Massa	Saluran publikasi dan edukasi	Menyebarkan informasi kegiatan, tujuan, dan manfaat program	Terlibat dalam kontrol sosial dan peningkatan literasi keamanan

2. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kalimantan Barat dirancang secara sistematis dan terstruktur agar setiap keluaran (output) yang ditargetkan dapat dicapai secara optimal sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Kurun waktu pencapaian keluaran disusun berdasarkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kegiatan yang melibatkan berbagai instansi terkait di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan.

Setiap keluaran dirancang untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan Satlinmas, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan kesiapsiagaan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta menghadapi potensi bencana. Proses ini dimulai dari penyusunan dokumen rencana kegiatan, pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi, pembentukan Satgas Linmas, penyediaan pelatihan serta sarana pendukung, sampai pada pelaksanaan simulasi dan kegiatan evaluasi di akhir tahun.

Kurun waktu pencapaian keluaran ini menjadi pedoman penting dalam pengelolaan kegiatan agar pelaksanaannya tepat waktu, terukur, dan sesuai dengan tujuan program.

Selain itu, penjadwalan keluaran juga memudahkan koordinasi antarinstansi dan pengawasan secara periodik terhadap capaian kegiatan.

Tabel Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Program

No	Keluaran yang Diharapkan	Kurun Waktu Pencapaian	Keterangan
1	Tersusunnya dokumen rencana kegiatan pembinaan Satlinmas tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Januari – Februari	Merupakan output awal perencanaan program berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor
2	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi lintas instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Februari – Maret	Diperlukan untuk menyamakan persepsi dan pembagian peran antar pemangku kepentingan
3	Terbentuknya struktur Satgas Linmas tingkat kecamatan dan Satlinmas desa/kelurahan	Maret – April	Hasil dari tindak lanjut koordinasi dan fasilitasi dari Satpol PP dan pemerintah daerah
4	Terlaksananya pelatihan dasar dan lanjutan bagi anggota Satlinmas	April – Juni	Melibatkan narasumber dari Satpol PP, BPBD, dan instansi teknis lainnya
5	Tersedianya sarana dan perlengkapan pendukung operasional Satlinmas	Juni – Juli	Distribusi logistik dilakukan setelah verifikasi kebutuhan dan alokasi anggaran
6	Terlaksananya simulasi penanganan gangguan ketenteraman dan penanggulangan bencana	Juli – Agustus	Meningkatkan kesiapsiagaan Satlinmas di wilayah rawan konflik dan bencana
7	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan Satlinmas di kabupaten/kota	September – Oktober	Melibatkan Bappeda, Satpol PP Provinsi, dan unsur pengawas lainnya
8	Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan program dan rekomendasi penguatan kelembagaan	November – Desember	Menjadi bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan tahun berikutn

3. Sasaran

Sasaran dari program ini adalah hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun sasaran tersebut meliputi:

No.	Sasaran Program	Uraian Lengkap	Relevansi Regulasi / Isu Strategis
1	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Satlinmas	Meningkatkan kompetensi anggota Satlinmas melalui pelatihan teknis, pembekalan bela negara, pengenalan mitigasi bencana, dan simulasi tugas lapangan, agar mampu berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum, menangani konflik sosial,	Permendagri No. 26 Tahun 2020 Pasal 10 dan 11 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

No.	Sasaran Program	Uraian Lengkap	Relevansi Regulasi / Isu Strategis
		serta merespons bencana secara sigap dan terstruktur.	
2	Terbentuknya Satgas Linmas di Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan	Mendorong pembentukan Satgas Linmas secara resmi dan fungsional di setiap wilayah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, disertai SK Kepala Daerah dan didukung sistem pelaporan yang tertib dan digital.	Mendukung Pasal 12 s.d. 16 Permendagri 26/2020 dan Surat Edaran Kemendagri terkait optimalisasi Satgas Linmas.
3	Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor	Mewujudkan kerjasama dan peran aktif antar-OPD, instansi vertikal, dan masyarakat dalam mendukung program ketenteraman dan ketertiban melalui forum koordinasi, integrasi program, dan pelibatan dalam penanganan kejadian luar biasa, termasuk dalam kegiatan Posyandu dan penanggulangan bencana.	Merujuk prinsip "whole of government" dan "whole of society" dalam tata kelola pemerintahan daerah.
4	Digitalisasi Tata Kelola Satlinmas Melalui Aplikasi Simlinmas	Meningkatkan efisiensi pendataan, pelaporan kegiatan, keanggotaan, serta dokumentasi kegiatan Satlinmas dan Satgas Linmas melalui optimalisasi Aplikasi Simlinmas yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota.	Mendukung transformasi digital layanan publik dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5	Meningkatnya Kinerja Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi	Menyelenggarakan Monev secara periodik oleh Tim Provinsi terhadap kabupaten/kota sasaran untuk menilai efektivitas pembentukan Satgas Linmas, pemanfaatan aplikasi, dan keberlanjutan kegiatan peningkatan kapasitas. Hasil Monev menjadi dasar perbaikan kebijakan dan program tahun berikutnya.	Sesuai siklus manajemen pembangunan daerah dan prinsip evaluasi berbasis kinerja.
6	Peningkatan Peran Satlinmas dalam Mendukung Program Lintas Sektor (Posyandu, Penanggulangan Bencana, Ketahanan Sosial)	Satlinmas diberdayakan untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Posyandu, kegiatan sosial masyarakat, serta siaga terhadap potensi gangguan ketertiban dan bencana. Hal ini menjadikan Satlinmas bagian dari sistem perlindungan sosial masyarakat.	Selaras dengan Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu dan Permendagri 26/2020 tentang Satlinmas.
7	Meningkatnya Kepedulian dan Partisipasi Aktif	Masyarakat diberdayakan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelibatan dalam forum	Menguatkan pilar partisipasi publik dalam pembangunan

No.	Sasaran Program	Uraian Lengkap	Relevansi Regulasi / Isu Strategis
	Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Ketenteraman	desa/kelurahan agar ikut menjaga ketertiban lingkungan, mendukung program Satlinmas, dan aktif dalam kesiapsiagaan bencana.	daerah dan pengelolaan keamanan berbasis komunitas.

4. Biaya Yang Diperlukan

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kalimantan Barat, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat diperlukan alokasi anggaran sebesar Rp. 287.448.000,00 pada T.A. 2026.
Adapun alokasi anggaran ini difokuskan untuk membiayai berbagai kegiatan strategis, antara lain:

1. Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Satgas Linmas di tiga kabupaten/kota (Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah), mencakup koordinasi lintas perangkat daerah, pembentukan tim, dan penyusunan dokumen pendukung.
2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Satlinmas dan Satgas Linmas, mencakup operasional teknis pelaksanaan kegiatan.
3. Pemantauan, Evaluasi, dan Supervisi oleh Tim Provinsi ke daerah sasaran, untuk memastikan proses pembentukan Satgas Linmas berjalan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Simlinmas, guna mendukung sistem pelaporan, pendataan anggota, serta dokumentasi kegiatan Satlinmas berbasis digital.
5. Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Kegiatan, termasuk pencetakan laporan, pembuatan video dokumenter, serta pelaporan akhir kepada pimpinan daerah dan kementerian terkait.

Anggaran sebesar Rp287.448.000,00 ini bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 melalui pos belanja kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat, dan diharapkan mampu memberikan output konkret berupa terbentuknya Satgas Linmas di wilayah sasaran, peningkatan kapasitas anggota, serta terbangunnya sistem informasi Satlinmas yang terintegrasi.

Dengan alokasi anggaran ini, program diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

Penanggungjawab
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat,

PARAF HIRARKI	
Kasi Pelatihan dan Mobilisasi	

Marselinus Franata, S.STP., M.A.P.
Pembina/(IV/a)
NIP. 19840730 200312 1 001

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar
Kegiatan		Koordinasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan pengalihan barang milik Daerah /kekayaam Negara dar Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6 ,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Nomor 2019 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Barat Nomor 2). 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor :258/BKAD/2025 tentang Penunjukan Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
	Gambaran Umum	Dalam rangka Rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah penyerapan anggaran terhadap realisasi fisik Anggaran dan keuangan diwajibkan setiap SKPD untuk melaporkan Tersedia nya Barang Milik Daerah Melalui sistem Siap BMD setiap bulan dalam tahun berjalan sehingga dapat diukur kinerja fisik dan keuangan SKPD setiap tahun.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaporan anggaran yang tersedia di Satpol PP Provinsi Kalbar setiap bulan dalam aplikasi Siap BMD dan format yang tersedia sesuai ketentuan yang ada yang wajib dikirmkan setiap bulannya dalam tahun berjalan.
	Indikator Kinerja	Terlaksananya 12 pelaporan penyerapan anggaran dalam tahun berjalan
	Batasan Kegiatan	Penyusunan pelaporan Melalui Siap BMD program dan kegiatan Satpol PP Prov Kalbar selama tahun berjalan
Maksud dan Tujuan		Sebagai bentuk pertanggungajawaban Kepala Satuan Pol PP terhadap evaluasi dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan selalu pengguna anggaran untuk melihat kinerja instansi tahun berjalan

Cara Pelaksanaan Kegiatan	Membuat pelaporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang dan kegiatan selama tahun berjalan sesuai format yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan Dan Aset Penanggung jawab :Sekretaris
Jadwal	2 bulan
Biaya	Rp. 3.999.900,-

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Keuangan Dan Aset

Riana Ernawati, S.M
NIP.19720629 199203 2 006

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar
Kegiatan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah Diubah beberapa kali dan terakhir Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Undang-Undang Nomor .9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Negara RI Tahun 2022Nomor 69 Lembar Negara RI No.6780 3. Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 25 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambagan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor3); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Kalimatantan Barat Nomor 5);
	Gambaran Umum	Satpol PP dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Akuntansi perlu menyusun laporan Keuangan yang memacu pada system Akuntansi Pemerinah (SAP), pennyusunan laporan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran

		Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara periodic dan berkala yang berpedoman pada Undang-undang yang berlaku .
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaporan tiap tahun berjalan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah yang wajib disampaikan tiap bulannya paling lambar tanggal 10 bulan berikutnya, Dan Pertriwulan serta setelah akhir tahun anggaran berakhir berupa Laporan Pertangung jawaban Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Presiden berupa melalui Menteri Dalam Negeri dan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Provinsi Kalimantan Barat
	Indikator Kinerja	Terlaksananya 1 Kali pelaporan
	Batasan Kegiatan	Penyusunan pelaporan Keuangan kegiatan Satpol PP Provinsi Kalbar dalam format Laporan Keuangan Tahunan .
Maksud dan Tujuan		Sebagai bentuk pertanggungajawaban Kepala Satuan Pol PP terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan fungsi sebagai entitas akuntansiperlu menyusun Laporan Keuangan yang Mengacu pada sistim Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat pelaporan Keuangan Tahunan program kegiatan selama tahun berjalan tahun 2023 yang dilaksanakan pada tahun awal tahun 2025
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan Dan Asset Penanggung jawab : Sekretaris
Jadwal		2 Bulan
Biaya		Rp. 4.217.000.-

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Keuangan Dan Aset

Riana Ernawati, S.M
NIP.19720629 199203 2 006

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar
Kegiatan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah Diubah beberapa kali dan terakhir Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Undang-Undang Nomor .9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Negara RI Tahun 2022Nomor 69 Lembar Negara RI No.6780 3. Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 25 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambagan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor3); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Kalimatantan Barat Nomor 5);
	Gambaran Umum	Satpol PP dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Tahun 2026 ,Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana akuntansi perlu menyusun laporan Keuangan yang memacu pada system Akuntansi Pemerinah (SAP), pennyusunan laporan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

		Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara periodic dan berkala yang berpedoman pada Undang-undang yang berlaku .
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaporan tiap tahun berjalan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah yang wajib disampaikan tiap bulannya paling lambar tanggal 10 bulan berikutnya, Dan Pertriwulan serta setelah akhir tahun anggaran berakhir berupa Laporan Pertangung jawaban Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Presiden berupa melalui Menteri Dalam Negeri dan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Provinsi Kalimantan Barat
	Indikator Kinerja	Terlaksananya 1 Kali pelaporan
	Batasan Kegiatan	Penyusunan pelaporan Keuangan kegiatan Satpol PP Provinsi Kalbar dalam format Laporan Keuangan Tahunan .
Maksud dan Tujuan		Sebagai bentuk pertanggungajawaban Kepala Satuan Pol PP terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan fungsi sebagai entitas akuntansiperlu menyusun Laporan Keuangan yang Mengacu pada sistim Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat pelaporan Keuangan Tahunan program kegiatan selama tahun berjalan 2025 yang dilaksanakan pada tahun awal tahun 2026
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan Dan Aset Penanggung jawab : Sekretaris
Jadwal		12 Bulan (Januari 2026 s/d Desember 2026)
Biaya		Rp. 3.812.000,-

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Keuangan Dan Aset

Riana Ernawati, S.M
NIP.19720629 199203 2 006

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar.
Kegiatan		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan pengalihan barang milik Daerah /kekayaam Negara dar Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6 ,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Nomor 2019 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Barat Nomor 2). 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor :258/BKAD/2025 tentang Penunjukan Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
	Gambaran Umum	Dalam rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah penyerapan anggaran terhadap realisasi fisik Anggaran dan keuangan diwajibkan setiap SKPD untuk melaporkan Tersedia nya Barang Milik Daerah Melalui sistem Siap BMD setiap bulan dalam tahun berjalan sehingga dapat diukur kinerja fisik dan keuangan SKPD setiap tahun.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaporan anggaran yang tersedia di Satpol PP Provinsi Kalbar setiap bulan dalam aplikasi Siap BMD dan format yang tersedia sesuai ketentuan yang ada yang wajib dikirimkan setiap bulannya dalam tahun berjalan.
	Indikator Kinerja	Terlaksananya 12 pelaporan penyerapan anggaran dalam tahun berjalan
	Batasan Kegiatan	Penyusunan pelaporan Melalui Siap BMD program dan kegiatan Satpol PP Prov Kalbar selama tahun berjalan
Maksud dan Tujuan		Sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Satuan Pol PP terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) serta Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya.

Cara Pelaksanaan Kegiatan	Membuat pelaporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang dan kegiatan selama tahun berjalan sesuai format yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan Dan Aset Penanggung jawab :Sekretaris
Jadwal	12 Bulan
Biaya	Rp. 15.240.000.-

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Keuangan Dan Aset

Riana Ernawati, S.M
NIP.19720629 199203 2 006

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar
Kegiatan		Penatausahaan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Pada SKPD.
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 dan Nomor5 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan pengalihan barang milik Daerah /kekayaam Negara dar Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6 ,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Nomor 2019 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Barat Nomor 2). 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor :258/BKAD/2025 tentang Penunjukan Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
	Gambaran Umum	Dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah penyerapan anggaran terhadap realisasi fisik Anggaran dan keuangan diwajibkan setiap SKPD untuk melaporkan Tersedia nya Barang Milik Daerah Melalui sistem Siap BMD dan SIP & PAS setiap bulan dalam tahun berjalan sehingga dapat diukur kinerja fisik dan keuangan SKPD setiap tahun.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaporan anggaran yang tersedia di Satpol PP Provinsi Kalbar setiap bulan dalam aplikasi Siap BMD dan SIP & PAS format yang tersedia sesuai ketentuan yang ada yang wajib dikirmkan setiap bulannya dalam tahun berjalan.
	Indikator Kinerja	Terlaksananya 12 pelaporan penyerapan anggaran dalam tahun berjalan
	Batasan Kegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD dan Penyusunan Laporan Milik Daerah Pada SKPD pelaporan Melalui Siap BMD dan SIP & PAS program dan kegiatan Satpol PP Prov Kalbar selama tahun berjalan
Maksud dan Tujuan		Sebagai bentuk pertanggungajawaban Kepala Satuan Pol PP terhadap evaluasi dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan selalu pengguna

	anggaran untuk melihat kinerja instansi tahun berjalan
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Membuat pelaporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang dan kegiatan selama tahun berjalan sesuai format yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan Dan Aset Penanggung jawab :Sekretaris
Jadwal	2 bulan
Biaya	Rp. 4.000.000.-

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak ,
Pelaksana
Kasubbag Keuangan Dan Aset

Riana Ernawati, S.M
NIP.19720629 199203 2 006

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar
Kegiatan		Pengadaan Mebel
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan pengalihan barang milik Daerah /kekayaam Negara dar Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6 ,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Nomor 2019 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Barat Nomor 2). 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor :258/BKAD/2025 tentang Penunjukan Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
	Gambaran Umum	Dalam rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah penyerapan anggaran terhadap realisasi fisik Anggaran dan keuangan diwajibkan setiap SKPD untuk melaporkan Tersedia nya Barang Milik Daerah Melalui sistem Siap BMD setiap bulan dalam tahun berjalan sehingga dapat diukur kinerja fisik dan keuangan SKPD setiap tahun.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaporan anggaran yang tersedia di Satpol PP Provinsi Kalbar setiap bulan dalam aplikasi Siap BMD dan format yang tersedia sesuai ketentuan yang ada yang wajib dikirimkan setiap bulannya dalam tahun berjalan.
	Indikator Kinerja	Terlaksananya 12 pelaporan penyerapan anggaran dalam tahun berjalan
	Batasan Kegiatan	Penyusunan pelaporan Melalui Siap BMD program dan kegiatan Satpol PP Prov Kalbar selama tahun berjalan
Maksud dan Tujuan		Sebagai bentuk pertanggungajawaban Kepala Satpol PP terhadap SDM Di Satpol PP Dengan Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Evaluasi dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan selalu pengguna anggaran untuk melihat kinerja instansi tahun berjalan

Cara Pelaksanaan Kegiatan	Membuat pelaporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang dan kegiatan selama tahun berjalan sesuai format yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan Dan Aset Penanggung jawab :Sekretaris
Jadwal	TW 2
Biaya	Rp. 19.290.000.-

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Keuangan Dan Aset

Riana Ernawati, S.M
NIP.19720629 199203 2 006

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar
Kegiatan		Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan pengalihan barang milik Daerah /kekayaam Negara dar Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6 ,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Nomor 2019 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Barat Nomor 2). 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor :258/BKAD/2025 tentang Penunjukan Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
	Gambaran Umum	Dalam rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah penyerapan anggaran terhadap realisasi fisik Anggaran dan keuangan diwajibkan setiap SKPD untuk melaporkan Tersedia nya Barang Milik Daerah Melalui sistem Siap BMD setiap bulan dalam tahun berjalan sehingga dapat diukur kinerja fisik dan keuangan SKPD setiap tahun.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaporan anggaran yang tersedia di Satpol PP Provinsi Kalbar setiap bulan dalam aplikasi Siap BMD dan format yang tersedia sesuai ketentuan yang ada yang wajib dikirimkan setiap bulannya dalam tahun berjalan.
	Indikator Kinerja	Terlaksananya 12 pelaporan penyerapan anggaran dalam tahun berjalan
	Batasan Kegiatan	Penyusunan pelaporan Melalui Siap BMD program dan kegiatan Satpol PP Prov Kalbar selama tahun berjalan
Maksud dan Tujuan		Sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Satuan Pol PP terhadap SDM Di Satpol PP Dengan Diadakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat pelaporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang dan kegiatan selama tahun berjalan sesuai format

	yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan Dan Aset Penanggung jawab :Sekretaris
Jadwal	TW 2
Biaya	Rp. 37.572.000.-

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak.
Pelaksana
Kasubbag Keuangan Dan Aset

Riana Ernawati, S.M
NIP.19720629 199203 2 006

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar
Kegiatan		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD.
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah Diubah beberapa kali dan terakhir Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Undang-Undang Nomor .9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Negara RI Tahun 2022Nomor 69 Lembar Negara RI No.6780 3. Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 25 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambagan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor3); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Kalimatantan Barat Nomor 5); 8. Surat Keputusan Kepala Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 04/Satpol PP/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),Pembuat Daftar Gaji dan Staf Penatausahaan Keuangan (SPK) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Penanggung Jawab

Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan,SH

NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak,

Pelaksana

Kasubbag Keuangan Dan Aset

Riana Ernawati, S.M

NIP.19720629 199203 2 006

	Gambaran Umum	Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Program dan Kegiatan di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu upaya Satpol PP Provinsi Kalbar beserta seluruh jajarannya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya sebagai Lembaga yang Profesional dalam Penegakkan Perda dan Pergub serta Menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyrakat Provinsi Kalbar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Kelancaran Pelaksanaan Prgram / Akuntabel ,Efektif ,tepat waktu dan sasaran perlu ditujuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembuat Daftar Gaji dan Staf Penatausahaan Keuangan (SPK) . Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tertip Adminstrasi keuangan secara berkesinambungan dengan tujuan memperoleh informasi apakah sampai sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, baik bagi peningkatan kinerja Satpol PP Provinsi Kalbar maupun bagi peningkatan kualitas sumber daya aparatur Satpol PP Provinsi Kalbar sendiri serta memberikan kontribusi yang berkesinambungan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan satpol PP Provinsi Kalbar .dengan membentuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) Pembuat Daftar Gaji dan Staf Penatausahaan Keuangan (SPK) dengan Fungsi dan tugas nya masing-masing.
	Indikator Kinerja	Terlaksananya Laporan bulanan SPJ Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD kegiatan Satpol PP Provinsi Kalbar
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Satpol PP Provinsi Kalbar selama tahun 2026
Maksud dan Tujuan		Tujuan Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan melancarkan Pelaksanaan Program /Kegiatan Satuan Perangkat Daerah dan Tertip administrasi Keuangan agar pelaksanaan Program /Kegiatan akuntabel tertip ,tepat waktu dan sasaran .
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat pelaporan kegiatan setiap bulan selama tahun berjalan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan dan Aset Penanggung jawab : Sekretaris
Jadwal		12 bulan
Biaya		Rp. 239.440.000,-

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Penyediaam Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar
Kegiatan		PenyediaanJasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan pengalihan barang milik Daerah /kekayaam Negara dar Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6 ,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Nomor 2019 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Barat Nomor 2). 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor :258/BKAD/2025 tentang Penunjukan Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
	Gambaran Umum	Dalam rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah penyerapan anggaran terhadap realisasi fisik Anggaran dan keuangan diwajibkan setiap SKPD untuk melaporkan Tersedia nya Barang Milik Daerah Melalui sistem Siap BMD setiap bulan dalam tahun berjalan sehingga dapat diukur kinerja fisik dan keuangan SKPD setiap tahun.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaporan anggaran yang tersedia di Satpol PP Provinsi Kalbar setiap bulan dalam aplikasi Siap BMD dan format yang tersedia sesuai ketentuan yang ada yang wajib dikirmkan setiap bulannya dalam tahun berjalan.
	Indikator Kinerja	Terlaksananya 12 pelaporan penyerapan anggaran dalam tahun berjalan
	Batasan Kegiatan	Penyusunan pelaporan Melalui Siap BMD program dan kegiatan Satpol PP Prov Kalbar selama tahun berjalan

Maksud dan Tujuan	Sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Satpol PP terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebutuhan Operasional Kendaraan /dan Pemelihraan, Kendaraan Opersional Di Satpol PP Dengan Diadaakan Penyediaann Jasa Pemeliharan ,Biaya Pemelihraan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Membuat pelaporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang dan kegiatan selama tahun berjalan sesuai format yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan Dan Aset Penanggung jawab :Sekretaris
Jadwal	12 Bulan
Biaya	Rp. 45.125.000.-

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Keuangan Dan Aset

Riana Ernawati, S.M
NIP.19720629 199203 2 006

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar
Kegiatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan .
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan pengalihan barang milik Daerah /kekayaam Negara dar Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6 ,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Nomor 2019 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Barat Nomor 2). 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor :258/BKAD/2025 tentang Penunjukan Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
	Gambaran Umum	Dalam rangka Rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah penyerapan anggaran terhadap realisasi fisik Anggaran dan keuangan diwajibkan setiap SKPD untuk melaporkan Tersedia nya Barang Milik Daerah Melalui sistem Siap BMD setiap bulan dalam tahun berjalan sehingga dapat diukur kinerja fisik dan keuangan SKPD setiap tahun.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaporan anggaran yang tersedia di Satpol PP Provinsi Kalbar setiap bulan dalam aplikasi Siap BMD dan format yang tersedia sesuai ketentuan yang ada yang wajib dikirmkan setiap bulannya dalam tahun berjalan.
	Indikator Kinerja	Terlaksananya 12 pelaporan penyerapan anggaran dalam tahun berjalan
	Batasan Kegiatan	Penyusunan pelaporan Melalui Siap BMD program dan

		kegiatan Satpol PP Prov Kalbar selama tahun berjalan
Maksud dan Tujuan		Sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Satpol PP terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Di Satpol PP Dengan diadakan Penyediaann Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat pelaporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang dan kegiatan selama tahun berjalan sesuai format yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan Dan Aset Penanggung jawab :Sekretaris
Jadwal		12 Bulan
Biaya		Rp. 156.849.100.-

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Keuangan Dan Aset

Riana Ernawati, S.M
NIP.19720629 199203 2 006

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Penyusunan Laporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar
Kegiatan		Penyusunan Laporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran .
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah Diubah beberapa kali dan terakhir Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Undang-Undang Nomor .9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Negara RI Tahun 2022Nomor 69 Lembar Negara RI No.6780 3. Peratutan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 25 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambagan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor3); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Kalimatantan Barat Nomor 5);
	Gambaran Umum	Dalam rangka evaluasi penyerapan anggaran terhadap realisasi fisik Anggaran dan keuangan diwajibkan setiap SKPD untuk melaporkan penyerapan anggaran /dana dalam sistem Simakda setiap bulan dalam tahun berjalan sehingga dapat diukur kinerja fisik dan keuangan SKPD setiap tahun.

Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaporan anggaran yang tersedia di Satpol PP Provinsi Kalbar setiap bulan dalam aplikasi Simakda dan format yang tersedia sesuai ketentuan yang ada yang wajib dikirmkan setiap bulannya dalam tahun berjalan.
	Indikator Kinerja	Terlaksananya 12 pelaporan penyerapan anggaran dalam tahun berjalan
	Batasan Kegiatan	Penyusunan pelaporan penyerapan anggaran program dan kegiatan Satpol PP Prov Kalbar selama tahun berjalan
Maksud dan Tujuan		Sebagai bentuk pertanggungajawaban Kepala Satuan Pol PP terhadap evaluasi dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan selalu pengguna anggaran untuk melihat kinerja instansi tahun berjalan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat pelaporan realisasi anggaran program dan kegiatan selama tahun berjalan sesuai format yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan Dan Aset Penanggung jawab :Sekretaris
Jadwal		2 bulan
Biaya		Rp. 3.420.000.-

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Keuangan Dan Aset

Riana Ernawati, S.M
NIP.19720629 199203 2 006

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar
Kegiatan		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan pengalihan barang milik Daerah /kekayaam Negara dar Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6 ,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Nomor 2019 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Barat Nomor 2). 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor :258/BKAD/2025 tentang Penunjukan Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
	Gambaran Umum	Dalam rangka Rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah penyerapan anggaran terhadap realisasi fisik Anggaran dan keuangan diwajibkan setiap SKPD untuk melaporkan Tersedia nya Barang Milik Daerah Melalui sistem Siap BMD setiap bulan dalam tahun berjalan sehingga dapat diukur kinerja fisik dan keuangan SKPD setiap tahun.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaporan anggaran yang tersedia di Satpol PP Provinsi Kalbar setiap bulan dalam aplikasi Siap BMD dan format yang tersedia sesuai ketentuan yang ada yang wajib dikirimkan setiap bulannya dalam tahun berjalan.
	Indikator Kinerja	Terlaksananya 12 pelaporan penyerapan anggaran dalam tahun berjalan
	Batasan Kegiatan	Penyusunan pelaporan Melalui Siap BMD program dan kegiatan Satpol PP Prov Kalbar selama tahun berjalan
Maksud dan Tujuan		Sebagai bentuk pertanggungajawaban Kepala Satuan Pol PP terhadap evaluasi dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan selaku pengguna

	anggaran untuk melihat kinerja instansi tahun berjalan
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Membuat pelaporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang dan kegiatan selama tahun berjalan sesuai format yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan Dan Aset Penanggung jawab :Sekretaris
Jadwal	2 bulan
Biaya	Rp. 4.000.000.-

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Keuangan Dan Aset

Riana Ernawati, S.M
NIP.19720629 199203 2 006

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar
Kegiatan		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD.
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan pengalihan barang milik Daerah /kekayaam Negara dar Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6 ,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Nomor 2019 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimanatan Barat Nomor 2). 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 258/BKAD/2025 tentang Penunjukan Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
	Gambaran Umum	Dalam rangka Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah penyerapan anggaran terhadap realisasi fisik Anggaran dan keuangan diwajibkan setiap SKPD untuk melaporkan Tersedia nya Barang Milik Daerah Melalui sistem Siap BMD dan SIP & PAS setiap bulan dalam tahun berjalan sehingga dapat diukur kinerja fisik dan keuangan SKPD setiap tahun.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaporan anggaran yang tersedia di Satpol PP Provinsi Kalbar setiap bulan dalam aplikasi Siap BMD dan SIP & PAS format yang tersedia sesuai ketentuan yang ada yang wajib dikirimkan setiap bulannya dalam tahun berjalan.
	Indikator Kinerja	Terlaksananya 12 pelaporan penyerapan anggaran dalam tahun berjalan
	Batasan Kegiatan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah Pada SKPD pelaporan Melalui Siap BMD dan SIP & PAS program dan kegiatan Satpol PP Prov Kalbar selama tahun

		berjalan
Maksud dan Tujuan		Sebagai bentuk pertanggungajawaban Kepala Satuan Pol PP terhadap evaluasi dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan selalu pengguna anggaran untuk melihat kinerja instansi tahun berjalan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat pelaporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang dan kegiatan selama tahun berjalan sesuai format yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan Dan Aset Penanggung jawab :Sekretaris
Jadwal		2 bulan
Biaya		Rp. 4.000.000.-

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Keuangan Dan Aset

Riana Ernawati, S.M
NIP.19720629 199203 2 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/*TERM OF REFERENCE* (TOR)
Tahun Anggaran 2026

Instansi	:	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Bidang	:	Perlindungan Masyarakat
Seksi	:	Data dan Informasi
Program	:	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Prioritas Daerah	:	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik
Kegiatan	:	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Sasaran Kegiatan	:	Presentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	:	Persentase penurunan jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalbar
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	:	Fasilitasi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Indikator KRO	:	Jumlah kegiatan koordinasi/fasilitasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas kabupaten/kota
Rincian Output	:	Terlaksananya kegiatan koordinasi, fasilitasi, dan sinergi antar kabupaten/kota dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum secara lintas daerah
Outcomes	:	Meningkatnya efektivitas penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum secara lintas daerah di Provinsi Kalimantan Barat melalui penguatan sinergi antar kabupaten/kota dan optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
Sub Kegiatan	:	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terselenggaranya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang terarah, berbasis data, dan mendukung penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum secara lintas daerah di Provinsi Kalimantan Barat
Indikator Sub Kegiatan	:	• Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat yang tersusun dan diusulkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan pelindungan masyarakat. • Jumlah dokumen laporan hasil pemberdayaan Satlinmas lintas

		kabupaten/kota yang mendukung evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan
Rincian Output Sub Kegiatan	:	• Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satuan Pelindungan Masyarakat • Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Outcomes Sub Kegiatan	:	1. Teridentifikasinya capaian dan tantangan pemberdayaan Satlinmas secara sistematis dan berbasis data sebagai dasar perumusan kebijakan dan program lanjutan. 2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat berbasis hasil evaluasi pemberdayaan Satlinmas. 3. Tersusunnya landasan hukum yang memperkuat tata kelola dan penyelenggaraan Satlinmas secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan di tingkat daerah. 4. Terjaminnya kepastian hukum dan peningkatan peran Satlinmas melalui pengesahan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat.
Jumlah Anggaran	:	Rp. 103.464.900,-

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	JUMLAH ANGGARAN
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	• Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum. • Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satuan Pelindungan Masyarakat	• Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum. • Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satuan Pelindungan Masyarakat	Rp. 103.464.900,-

1. **Latar Belakang**
   a) **Dasar Hukum**
      a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
      b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
      c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
      d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
      e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2oi8 Nomor 2);
      f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
      g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
      h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
      i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548)
      j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
      k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Sarana Dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Dan Satuan Pelindungan Masyarakat;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu;
n. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026;
o. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 44/SATPOLPP/2024 tentang Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.

b) Gambaran Umum

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan tersebut, keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai bagian dari potensi masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu upaya preventif, penanggulangan bencana, dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kelurahan.

Namun demikian, dalam implementasinya, pemberdayaan Satlinmas di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya pembinaan kelembagaan, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana pendukung, serta belum adanya regulasi teknis yang mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan Satlinmas di tingkat provinsi.

Oleh karena itu, sub kegiatan ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, penyusunan laporan hasil pemberdayaan Satlinmas, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memetakan pelaksanaan kegiatan pembinaan serta memberdayakan Satlinmas secara menyeluruh, sebagai dasar perencanaan kebijakan ke depan. Laporan ini akan menggambarkan kondisi eksisting, capaian kegiatan, tantangan di lapangan, serta rekomendasi perbaikan yang dibutuhkan.

Kedua, disusunnya Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat, sebagai bentuk penguatan regulasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan ini akan menjadi acuan operasional bagi perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membina dan memberdayakan Satlinmas secara terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan.

Dengan adanya kedua output ini, diharapkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dapat lebih efektif, profesional, serta mampu meningkatkan partisipasi dan peran aktif Satlinmas dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat.

2. Fokus dan Ruang Lingkup Kegiatan

Fokus kegiatan ini adalah:

a) Inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pemberdayaan Satlinmas, baik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan ini meliputi pendataan kelembagaan Satlinmas, pemberdayaan Satlinmas, pendampingan teknis, serta pelibatan aktif Satlinmas dalam kegiatan yang mendukung ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat lokal.
b) Analisis capaian dan tantangan pemberdayaan Satlinmas, yang mencakup evaluasi hasil pelaksanaan program di berbagai wilayah, identifikasi hambatan teknis dan administratif, serta pemetaan kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan logistik, dan peningkatan koordinasi lintas sektor antar pemangku kepentingan.

c) Penyusunan laporan hasil pemberdayaan Satlinmas, yang menggambarkan kondisi eksisting Satlinmas di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk praktik baik, kendala lapangan, serta rekomendasi strategis dan aplikatif untuk peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan Satlinmas di masa mendatang.
d) Perumusan draf Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satlinmas, yang mencakup pengaturan mengenai kelembagaan, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban anggota Satlinmas, mekanisme pembinaan dan pemberdayaan, sistem pelaporan, pendanaan, koordinasi antar sektor, serta tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan di tingkat daerah.
e) Harmonisasi dan penjaringan aspirasi terhadap draf Peraturan Gubernur, melalui kegiatan diskusi terfokus dan forum konsultatif yang dilaksanakan di 5 wilayah kabupaten/kota strategis;
f) Finalisasi draf Peraturan Gubernur, berdasarkan hasil harmonisasi dan masukan stakeholder, guna memastikan bahwa substansi regulasi telah sesuai dengan kebutuhan daerah, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta prinsip-prinsip perlindungan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel.
g) Sosialisasi dan internalisasi Peraturan Gubernur, untuk memastikan pemahaman dan kesiapan implementasi di tingkat pelaksana, khususnya di 4 kabupaten/kota yang menjadi prioritas awal implementasi;
h) Kegiatan sosialisasi akan melibatkan perangkat daerah teknis, Satpol PP kabupaten/kota, unsur pemerintah desa/kelurahan, serta anggota Satlinmas, guna mendorong keseragaman pemahaman terhadap peran, tugas, serta mekanisme kerja Satlinmas sesuai ketentuan yang baru.

3. Lokus Kegiatan Prioritas

Kegiatan penyusunan laporan hasil pemberdayaan Satlinmas dan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan secara terstruktur dan partisipatif dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai locus utama pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat. Pemilihan wilayah locus kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran wilayah, keterwakilan geografis, serta dinamika pelaksanaan tugas Satlinmas di lapangan.

Kegiatan ini juga dirancang untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna memastikan substansi regulasi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di daerah. Selain itu, pendekatan wilayah klaster dilakukan untuk efisiensi koordinasi dan efektivitas penyampaian informasi di lapangan.

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang dikelompokkan dalam klaster wilayah sebagai berikut:

a) Kota Singkawang
   Sebagai tuan rumah forum diskusi dan harmonisasi, melibatkan:
   - Kabupaten Bengkayang
   - Kabupaten Sambas
b) Kabupaten Ketapang
   Sebagai pusat kegiatan untuk wilayah selatan Kalimantan Barat, melibatkan:
   - Kabupaten Kayong Utara
c) Kabupaten Sekadau
   Sebagai tuan rumah penjaringan aspirasi wilayah timur, melibatkan:
   - Kabupaten Sintang
   - Kabupaten Kapuas Hulu

d) Kabupaten Landak
Sebagai lokasi tunggal dalam pelaksanaan diskusi terfokus dan koordinasi lintas sektor.

e) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak)
Sebagai locus konsultasi dan fasilitasi harmonisasi regulasi dalam rangka finalisasi draf Peraturan Gubernur.

f) Kabupaten/Kota Prioritas Sosialisasi Peraturan Gubernur
Sosialisasi dan internalisasi regulasi akan difokuskan di:
- Kabupaten Ketapang
- Kota Singkawang
- Kabupaten Sekadau
- Kabupaten Landak

4. Sasaran Dan Outcome Kegiatan

Sasaran Kegiatan:
- 120 personel Satlinmas kabupaten/kota se-Kalimantan Barat;
- Satlinmas desa/kelurahan yang belum aktif atau belum terbentuk;
- Satgas Linmas tingkat kecamatan yang masih memerlukan dukungan pembentukan, pelatihan dan pemberdayaan;
- Personel yang akan bertugas di TPS pada Pemilu 2024 tahap lanjutan (Pilkada serentak 2026).

Outcome yang Diharapkan:
- Terbentuknya Satlinmas yang siaga, kompeten, dan berdaya guna;
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan Satlinmas di tingkat desa dan kecamatan;
- Penguatan koordinasi vertikal dan horizontal antara Satlinmas provinsi dan kabupaten/kota;
- Terciptanya kondisi sosial yang tertib, aman, dan responsif terhadap bencana dan kerawanan sosial;
- Integrasi tugas Satlinmas dengan layanan sosial seperti Posyandu, Simlinmas, dan perlindungan warga.

c) **Maksud dan Tujuan**

a. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bidang Perlindungan Masyarakat, untuk memperkuat sistem perlindungan masyarakat secara terpadu dan berjenjang, dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan.

Fokus utama diarahkan pada wilayah penyangga Ibu Kota Provinsi, yang secara geografis dan sosial memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi, pertumbuhan wilayah pesat, dan berpotensi mengalami kerawanan sosial, bencana, maupun konflik horizontal.

b. Tujuan:

Pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Provinsi Kalimantan Barat. Satlinmas memiliki posisi strategis sebagai potensi masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Namun demikian, keberadaan Satlinmas belum sepenuhnya didukung oleh sistem pembinaan yang optimal dan regulasi teknis yang memadai di tingkat provinsi. Oleh karena itu, kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk menyediakan landasan kebijakan dan dokumen pendukung yang dapat

memperkuat pelaksanaan fungsi Satlinmas secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Tujuan kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh proses pemberdayaan Satlinmas berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan Satlinmas dapat menjalankan perannya secara lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

1) Satgas Linmas Kabupaten/Kota, khususnya di wilayah strategis penyangga Provinsi Kalimantan Barat seperti Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah;
2) Satgas Linmas Kecamatan, sebagai perpanjangan fungsi koordinatif dan operasional dalam respons ketertiban dan kedaruratan;
3) Satlinmas Desa/Kelurahan, sebagai kekuatan perlindungan paling dekat dengan masyarakat dan garda terdepan dalam mendukung program-program pemerintah di tingkat lokal.

a. Mendorong percepatan implementasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, terutama dalam aspek penataan struktur kelembagaan Satlinmas dan penguatan kapasitas personelnya.
b. Membangun sinergi dan kolaborasi antara lintas pemangku kepentingan, meliputi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan), TNI/Polri, BPBD, dan instansi teknis lainnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Satlinmas secara terpadu dan responsif terhadap dinamika lokal.
c. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan operasional personel Satlinmas dalam menghadapi berbagai bentuk potensi gangguan ketertiban umum, konflik sosial, bencana alam, dan kondisi darurat lainnya,
d. Mendorong pengarusutamaan peran Satlinmas dalam kegiatan pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan, seperti pengamanan Posyandu, pelaksanaan Pilkada/Pemilu, kegiatan sosial keagamaan, penanggulangan bencana, dan partisipasi dalam forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).
e. Mengoptimalkan peran wilayah penyangga sebagai zona stabilitas sosial, dengan memperkuat kehadiran Satlinmas dalam menjaga harmoni sosial, deteksi dini gangguan ketertiban, serta sebagai pelindung dan pelayan masyarakat di tingkat paling bawah.
f. Menjadi wadah monitoring dan evaluasi kinerja Satlinmas secara menyeluruh, serta sebagai sarana untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan masing-masing wilayah.

d) Alasan Kegiatan dilaksanakan

Sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Satlinmas merupakan komponen penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta membantu dalam penanggulangan bencana, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala struktural maupun operasional.

Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk menghimpun data dan menganalisis praktik pemberdayaan yang telah dilakukan, tetapi juga menyusun kebijakan yang bersifat strategis melalui perumusan Peraturan Gubernur sebagai payung hukum pelaksanaan Satlinmas di tingkat daerah. Dengan dilaksanakannya

kegiatan ini, diharapkan akan tersedia dokumen yang komprehensif dan kebijakan yang aplikatif guna meningkatkan kinerja Satlinmas secara menyeluruh.

Tujuan-tujuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam bentuk poin-poin berikut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah dan sasaran kegiatan yang akan dicapai.

1) Peningkatan efektivitas Satlinmas sangat penting untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, namun saat ini kapasitas kelembagaan dan keterampilan personel Satlinmas masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan terstruktur dan pelatihan intensif untuk dapat diberdayakan secara optimal.
2) Banyak Satlinmas yang beroperasi dengan keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga penguatan aspek logistik dan fasilitas pendukung perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari secara optimal.
3) Sistem pembinaan yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan dan tantangan di lapangan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan evaluasi menyeluruh atas capaian dan hambatan, sehingga langkah-langkah perbaikan yang konkret dapat diimplementasikan.
4) Regulasi teknis yang mengatur penyelenggaraan Satlinmas di tingkat provinsi belum ada atau masih belum memadai. Penyusunan Peraturan Gubernur sebagai payung hukum akan menjadi dasar operasional yang memperjelas tugas, fungsi, hak, kewajiban, serta mekanisme pembinaan dan koordinasi.
5) Penguatan koordinasi dan integrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi terkait seperti Satpol PP dan Biro Hukum sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan bencana. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaring aspirasi seluruh pihak guna menyusun kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lapangan.
6) Provinsi Kalimantan Barat menghadapi berbagai potensi gangguan ketenteraman, konflik sosial, dan bencana alam. Satlinmas sebagai garda terdepan harus dipersiapkan secara matang agar mampu merespons secara cepat dan efektif dalam situasi darurat.
7) Kegiatan ini mendukung percepatan implementasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, sehingga kebijakan yang telah dirumuskan dapat segera terealisasi melalui regulasi dan pembinaan yang terpadu.
8) Dengan adanya landasan hukum yang kuat dan standar operasional yang jelas, Satlinmas diharapkan dapat bekerja secara profesional, responsif, dan akuntabel dalam menjalankan tugas, sehingga kontribusinya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dapat semakin optimal.

e) **Dampak Negatif Jika Tidak Dilaksanakan:**

Kegiatan ini memiliki peran strategis dalam memperkuat kelembagaan dan efektivitas peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai ujung tombak dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di daerah. Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka akan timbul berbagai dampak negatif yang tidak hanya memengaruhi kinerja Satlinmas secara langsung, tetapi juga berdampak luas terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam merespons dinamika sosial, bencana, dan kondisi darurat lainnya.

Ketiadaan landasan hukum yang jelas, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta kurangnya evaluasi dan dokumentasi program pemberdayaan dapat menghambat pembinaan Satlinmas secara menyeluruh. Hal ini pada akhirnya berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik di bidang ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta mengabaikan potensi besar Satlinmas sebagai kekuatan sosial strategis di tingkat lokal.

Adapun beberapa dampak negatif yang berpotensi terjadi apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1) Rendahnya Kesiapsiagaan dan Kapasitas Anggota Satlinmas

- Tanpa pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembinaan, anggota Satlinmas di tingkat desa/kelurahan akan kekurangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang dibutuhkan dalam menghadapi tugas-tugas di lapangan, terutama dalam penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta bantuan penanganan bencana.
- Hal ini akan berdampak pada minimnya profesionalitas dan reaktivitas Satlinmas dalam situasi darurat, yang berisiko memperbesar dampak sosial, ekonomi, dan keamanan bagi masyarakat.

2) Terhambatnya Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota dan Kecamatan
   - Tidak adanya fasilitasi dari Pemerintah Provinsi akan menyebabkan lambannya realisasi pembentukan Satgas Linmas di kabupaten/kota dan Satgas Linmas Kecamatan, yang menjadi salah satu amanat dari Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.
   - Daerah yang belum membentuk Satgas Linmas akan kesulitan mengoordinasikan anggota Satlinmas dalam skala luas, baik dalam konteks penanganan gangguan sosial maupun kegiatan kemasyarakatan strategis.
3) Lemahnya Sinergi Antarinstansi dan Antarlevel Pemerintahan
   - Kegiatan ini memiliki fungsi penting sebagai wadah koordinasi antara perangkat daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum, serta instansi terkait seperti BPBD, Dinas Sosial, TNI, Polri, dan unsur pemerintah desa/kelurahan.
   - Tanpa forum fasilitasi ini, akan terjadi tumpang tindih tugas, lemahnya alur komando, serta tidak sinkronnya langkah-langkah perlindungan masyarakat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
4) Menurunnya Partisipasi Satlinmas dalam Program Lintas Sektor seperti Posyandu dan Ketahanan Sosial
   - Satlinmas juga memiliki fungsi pendukung dalam kegiatan pelayanan dasar masyarakat seperti Posyandu, pelayanan kesehatan, dan ketahanan sosial di kelurahan.
   - Ketiadaan pembinaan dan sinergi lintas program akan membuat potensi ini tidak tergarap, yang pada akhirnya memperlemah daya dukung sosial Satlinmas terhadap pembangunan berbasis masyarakat.
5) Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Aparat Perlindungan Masyarakat
   - Masyarakat akan merasakan langsung dampak dari tidak berfungsinya Satlinmas secara maksimal di lingkungan mereka, seperti lambatnya penanganan gangguan lingkungan, kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta tidak adanya respons cepat dalam keadaan darurat.
   - Hal ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran pemerintah dalam melindungi, melayani, dan memberdayakan mereka secara nyata.
6) Gagalnya Pencapaian Target Kinerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   - Tanpa kegiatan ini, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat tidak dapat tercapai.
   - Hal ini akan berdampak pada penilaian kinerja pemerintah daerah, termasuk evaluasi dari inspektorat dan Kementerian Dalam Negeri, serta berisiko terhadap pengurangan dukungan dana dekonsentrasi atau Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik.

7) Meningkatnya Risiko Konflik Sosial dan Kerawanan Wilayah
   - Daerah-daerah dengan potensi konflik sosial, perbatasan, atau dengan keanekaragaman budaya dan etnisitas seperti di Kalimantan Barat, sangat membutuhkan kehadiran Satlinmas yang sigap dan berwawasan lokal.
   - Tanpa pembinaan dan fasilitasi rutin, wilayah-wilayah tersebut akan menjadi lebih rentan terhadap konflik horizontal, gangguan SARA, perusakan fasilitas umum, serta potensi mobilisasi massa liar yang dapat mengancam stabilitas daerah.
8) Tidak Tersalurkannya Aspirasi dan Kebutuhan Satlinmas Daerah
   - Kegiatan fasilitasi juga menjadi sarana untuk menjaring aspirasi, kendala operasional, dan kebutuhan Satlinmas di tingkat kabupaten/kota dan desa.
   - Jika kegiatan tidak dilaksanakan, akan terjadi miskomunikasi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam hal kebijakan, dukungan anggaran, distribusi atribut dan sarana-prasarana Satlinmas, serta pembaruan regulasi teknis.

f) **Penerima Manfaat**

Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem perlindungan masyarakat yang terarah, profesional, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat. Melalui dua indikator utama, yaitu tersedianya laporan hasil pemberdayaan Satlinmas dan tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satlinmas, sub kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat lokal.

Manfaat dari pelaksanaan sub kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh Satlinmas sebagai pelaku utama di lapangan, tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya. Mulai dari instansi pemerintah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan, lembaga terkait lintas sektor sebagai mitra kolaboratif, hingga masyarakat umum sebagai penerima akhir manfaat dalam bentuk lingkungan yang lebih aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan.

Dengan adanya laporan yang memuat hasil pemberdayaan serta regulasi yang jelas dan aplikatif, maka penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan fungsi Satlinmas dapat diwujudkan secara lebih efektif. Untuk itu, identifikasi penerima manfaat menjadi penting sebagai dasar pengukuran dampak dan arah kebijakan berkelanjutan di masa mendatang.

Tabel Penerima Manfaat
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No.	Penerima Manfaat	Jenis Manfaat	Penjelasan Manfaat
1.	Satlinmas di Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemberdayaan dan Kepastian Hukum	Mendapat Sosialisasi dan kejelasan peran serta kewajiban dalam regulasi, yang mendukung profesionalisme dan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.
2.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Dasar Perumusan Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan	Mendapatkan data, analisis, dan regulasi yang memperkuat perencanaan program serta koordinasi lintas sektor dalam pembinaan Satlinmas.

No.	Penerima Manfaat	Jenis Manfaat	Penjelasan Manfaat
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pedoman Operasional Penyelenggaraan Satlinmas	Menerima acuan hukum dan program pembinaan yang seragam, sehingga penyelenggaraan Satlinmas di daerah menjadi lebih tertib dan terarah.
4.	Instansi Terkait (BPBD, TNI, Polri, Dinsos, dll.)	Penguatan Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor	Mendapat kepastian peran dalam mendukung dan berkoordinasi dengan Satlinmas dalam penanganan ketenteraman, ketertiban, dan kedaruratan.
5.	Masyarakat Umum	Lingkungan Aman dan Tertib	Merasakan manfaat langsung dari meningkatnya peran Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungan permukiman.
6.	Biro Hukum dan Lembaga Legislatif Daerah	Landasan Formulasi Regulasi	Mendapat bahan teknis dan aspirasi lapangan untuk mendukung penyusunan Peraturan Gubernur yang sesuai kebutuhan daerah.

g) **Strategi Pencapaian Keluaran**

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan keluaran dari sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, diperlukan suatu strategi pelaksanaan yang terencana, sistematis, dan terukur. Strategi ini disusun sebagai panduan untuk memastikan bahwa setiap langkah kegiatan mampu menghasilkan output yang relevan, efektif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas serta peran aktif Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Provinsi Kalimantan Barat.

Strategi pencapaian keluaran terdiri atas beberapa komponen penting, yakni: strategi umum yang menjadi landasan konseptual, strategi teknis operasional sebagai pendekatan implementatif, tahapan pelaksanaan untuk mengatur alur kegiatan secara bertahap, tahapan monitoring dan evaluasi guna memastikan kualitas dan efektivitas pelaksanaan, serta tahapan tindak lanjut dan keberlanjutan untuk menjaga konsistensi hasil dan dampak jangka panjang. Keseluruhan strategi ini didukung dengan indikator keberhasilan yang konkret untuk memantau sejauh mana keluaran kegiatan dapat dicapai secara optimal.

Dengan strategi yang tepat dan terukur, diharapkan kegiatan ini tidak hanya menghasilkan produk berupa laporan dan regulasi, tetapi juga mampu memperkuat tata kelola perlindungan masyarakat yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

a. Strategi Umum

Strategi umum merupakan pendekatan makro yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan sub kegiatan. Strategi ini menitikberatkan pada penguatan sistem, regulasi, dan sinergi lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan pemberdayaan Satlinmas di Provinsi Kalimantan Barat.

No	Strategi Umum	Penjelasan
1	Penguatan Sistem Pemberdayaan Satlinmas	Membangun sistem yang terintegrasi berbasis data dan evaluasi kebutuhan.
2	Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor	Meningkatkan kolaborasi antara provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait.
3	Penguatan Regulasi	Menyusun regulasi (Peraturan Gubernur) sebagai dasar hukum yang kuat dan aplikatif.

b. Strategi Teknis Operasional

Strategi teknis operasional merupakan langkah konkret dalam pelaksanaan kegiatan, meliputi metode, pendekatan, dan instrumen teknis yang digunakan untuk mencapai keluaran kegiatan.

No	Strategi Teknis	Penjelasan
1	Inventarisasi dan Dokumentasi	Menghimpun data kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan.
2	Analisis Kebutuhan dan Tantangan	Menganalisis kesenjangan kapasitas, sarpras, dan koordinasi antar pihak.
3	Penyusunan Laporan Hasil	Merumuskan kondisi eksisting, praktik baik, kendala, dan rekomendasi.
4	Penyusunan dan Harmonisasi Pergub	Menyusun draf dan menjaring masukan melalui uji publik dan konsultasi.
5	Sosialisasi dan Internalisasi	Menyebarluaskan regulasi kepada pelaksana dan pemangku kepentingan.

c. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap agar proses dapat terukur, terpantau, dan menghasilkan output yang berkualitas.

No	Tahapan	Kegiatan Utama
1	Persiapan	Pembentukan tim kerja, penyusunan jadwal dan rencana kerja.
2	Pelaksanaan Teknis	Pengumpulan data, analisis, penyusunan laporan, draf Pergub.
3	Konsultasi Publik	Penjaringan aspirasi dan koordinasi lintas kabupaten/kota.
4	Finalisasi	Penyempurnaan draf Pergub berdasarkan masukan.
5	Sosialisasi	Diseminasi regulasi dan peningkatan pemahaman pelaksana.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi menjadi alat kontrol yang penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan menghasilkan dampak yang diharapkan.

No	Jenis Monev	Penjelasan
1	Monitoring Internal	Dilakukan secara berkala oleh tim provinsi pada setiap tahapan.
2	Evaluasi Antara	Dilaksanakan setelah penyusunan laporan dan konsultasi publik.
3	Evaluasi Akhir	Setelah sosialisasi Pergub untuk menilai ketercapaian indikator.

e. Tindak Lanjut dan Keberlanjutan

Tindak lanjut memastikan bahwa kegiatan tidak berhenti hanya pada output, tetapi berkelanjutan dalam perencanaan dan program-program lanjutan.

No	Tindak Lanjut	Penjelasan
1	Integrasi dalam Perencanaan	Mengarusutamakan hasil evaluasi dalam dokumen perencanaan daerah.
2	Pemberdayaan Lanjutan	Menyusun Pemberdayaan Satlinmas berkelanjutan berbasis regulasi baru.
3	Sistem Digitalisasi	Pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan digital Satlinmas.

4	Replikasi Program	Perluasan ke seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

f. Indikator Keberhasilan Strategi

Indikator keberhasilan digunakan untuk mengukur efektivitas strategi yang telah dilaksanakan serta menjamin pencapaian keluaran secara objektif dan terukur.

No	Indikator	Penjelasan
1	Laporan Pemberdayaan Satlinmas Tersedia	Terdokumentasi, valid, dan digunakan untuk dasar kebijakan.
2	Peraturan Gubemur Disahkan	Produk hukum resmi tersedia dan berlaku.
3	Sosialisasi Dilaksanakan	Terselenggara di 4 kabupaten/kota dengan output jelas.
4	Partisipasi Satlinmas Meningkat	Terlihat dari laporan keterlibatan dalam kegiatan ketertiban umum.
5	Terbentuknya Forum Koordinasi	Wadah komunikasi lintas sektor yang aktif dan berkelanjutan.

h) **Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

NO	KEGIATAN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
1	Pembentukan tim pelaksana dan penyusunan rencana kerja	☑	☑										
2	Inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pemberdayaan Satlinmas		☑	☑	☑								
3	Analisis capaian, tantangan, dan kebutuhan penguatan Satlinmas			☑	☑	☑							
4	Penyusunan laporan hasil pemberdayaan Satlinmas				☑	☑	☑						
5	Penyusunan draf Peraturan Gubernur	☑	☑	☑	☑								
6	Harmonisasi dan penjaringan aspirasi Pergub (5 wilayah klaster)			☑	☑	☑							
7	Finalisasi dan pengesahan Pergub					☑	☑	☑					
8	Sosialisasi dan internalisasi Pergub (4 kabupaten/kota sasaran utama)								☑	☑	☑	☑	
9	Monitoring dan evaluasi implementasi awal regulasi										☑	☑	☑

☑ = Waktu pelaksanaan utama kegiatan

Catatan:

- Jadwal ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan dinamika lapangan dan keputusan strategis tim pelaksana.
- Jika kegiatan dimulai di pertengahan tahun, kegiatan di bulan Januari–Juni dapat digeser ke bulan berikutnya secara proporsional.

i) **Instansi Yang Akan Di Libatkan**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, diperlukan dukungan dan sinergi lintas sektor dari berbagai instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keterlibatan aktif para pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan program, baik dari sisi perumusan kebijakan, pelaksanaan teknis, hingga penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai garda terdepan perlindungan masyarakat.

Tabel berikut memuat daftar instansi pendukung beserta peran, manfaat, serta keterangan kontribusi masing-masing dalam mendukung terwujudnya laporan hasil pemberdayaan serta perumusan regulasi daerah berupa Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satlinmas. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola dan keberlanjutan upaya pemberdayaan Satlinmas yang terintegrasi dalam sistem ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel Instansi Pendukung
Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Nama Instansi	Peran	Keterangan	Manfaat yang Diperoleh
1	Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung jawab kegiatan, pembina teknis, dan penggerak utama	Melakukan koordinasi lintas sektor serta menyusun laporan dan draf regulasi	Penguatan kelembagaan dan peningkatan peran dalam pembinaan Satlinmas di daerah
2	Satpol PP Kabupaten/Kota	Pelaksana teknis di lapangan, fasilitator dan pendamping Satlinmas	Menyediakan data, mendukung pelaksanaan kegiatan, dan ikut serta dalam harmonisasi regulasi	Meningkatkan kapasitas daerah dalam pembinaan dan operasional Satlinmas
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar	Mitra pemberdayaan masyarakat desa	Mendukung integrasi Satlinmas dengan program pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatkan sinergi peran Satlinmas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
4	Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penguatan wawasan kebangsaan dan deteksi dini konflik sosial	Mendorong sinergi program ketahanan masyarakat berbasis Linmas	Pemanfaatan peran Linmas dalam mendukung stabilitas sosial dan keamanan lokal
5	BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Mitra dalam pelatihan kebencanaan dan penanggulangan darurat	Memberikan pelatihan kepada Satlinmas dalam aspek kebencanaan dan kesiapsiagaan	Dukungan personel terlatih dalam mitigasi dan penanggulangan bencana

No	Nama Instansi	Peran	Keterangan	Manfaat yang Diperoleh
6	TNI/Polri (Kodim, Polres, Bhabinkamtibmas)	Pembinaan kedisiplinan dan penguatan kapasitas keamanan masyarakat	Terlibat dalam pelatihan, pembinaan, serta penguatan peran Satlinmas sebagai mitra keamanan	Terbentuknya kolaborasi strategis dalam menjaga Kamtibmas
7	Biro Hukum Setda Provinsi	Harmonisasi dan legalisasi produk hukum	Mendampingi penyusunan dan evaluasi draf Peraturan Gubernur	Kepastian hukum terhadap regulasi yang disusun
8	Bagian Hukum	Review dan masukan substansi lokal terhadap regulasi	Mendukung penyesuaian dan implementasi Peraturan Gubernur di tingkat daerah	Kepastian pelaksanaan teknis yang sesuai dengan kebutuhan lokal
9	Kelurahan/Desa	Basis operasional Satlinmas di wilayah	Memberikan data dan dukungan pelaksanaan kegiatan di lapangan	Penguatan koordinasi dan dukungan terhadap tugas Satlinmas
10	Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Pol PUM)	Rujukan kebijakan dan regulasi nasional	Sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan pusat terkait Linmas	Kepatuhan terhadap regulasi nasional dan pembinaan secara berjenjang

j) **Kurun Waktu Pencapaian Keluaran**

Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara terstruktur sepanjang tahun anggaran dengan tahapan yang disusun berdasarkan urgensi, keterkaitan antar komponen kegiatan, serta alokasi waktu yang memadai untuk pencapaian keluaran secara optimal. Rincian kurun waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pelaksana dan Penyusunan Rencana Kerja dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari, sebagai tahap awal yang sangat krusial untuk merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan dan pembagian tugas secara terorganisir.
2. Inventarisasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan Satlinmas dilakukan pada Februari hingga April, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pelatihan, pendampingan, serta keterlibatan Satlinmas (pemberdayaan) dari seluruh kabupaten/kota.
3. Analisis Capaian, Tantangan, dan Kebutuhan Penguatan Satlinmas dilakukan sepanjang Maret hingga Mei, sebagai dasar identifikasi kebutuhan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM Satlinmas.
4. Penyusunan Laporan Hasil Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan pada April hingga Juni, untuk menyusun laporan komprehensif yang mencakup kondisi eksisting, praktik baik, kendala, serta rekomendasi.
5. Penyusunan Draf Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satlinmas dilakukan sejak Januari hingga April, secara paralel dengan analisis kebijakan dan konsultasi teknis lintas sektor.

6. Harmonisasi dan Penjaringan Aspirasi terhadap Draf Peraturan Gubernur dilaksanakan pada Mei hingga Juli, melalui kegiatan forum diskusi dan FGD di lima klaster kabupaten/kota.
7. Finalisasi dan Pengesahan Peraturan Gubernur dijadwalkan pada Juli hingga September, setelah menerima masukan dari stakeholder, Biro Hukum, dan perangkat daerah terkait.
8. Sosialisasi dan Internalisasi Peraturan Gubernur kepada pemangku kepentingan utama dilaksanakan pada Oktober hingga Desember, dengan fokus pada empat kabupaten/kota prioritas pelaksanaan.
9. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Awal Peraturan Gubernur dilaksanakan pada Oktober hingga Desember, untuk menilai efektivitas awal pelaksanaan regulasi dan mengidentifikasi perbaikan lanjutan.

k) Sasaran

Dalam rangka mewujudkan perlindungan masyarakat yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika ketenteraman dan ketertiban umum, diperlukan adanya sasaran yang terarah dan terukur pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Sasaran dari sub kegiatan ini disusun untuk menjawab kebutuhan strategis di tingkat daerah, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui pendekatan regulatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penetapan sasaran ini juga memperhatikan mandat regulasi yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satlinmas, serta isu-isu strategis daerah yang menyangkut peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum.

Tabel Sasaran Sub Kegiatan

No.	Sasaran Program	Uraian Lengkap	Relevansi Regulasi / Isu Strategis
1	Tersusunnya laporan pemberdayaan Satlinmas yang komprehensif	Mendokumentasikan kegiatan pemberdayaan Satlinmas yang telah dan sedang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat.	Mendukung implementasi pasal 37 dan 38 Permendagri 26/2020 tentang pelaporan dan evaluasi pembinaan Satlinmas; menjawab kebutuhan data berbasis bukti untuk perencanaan program.
2	Tersusunnya draf Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satlinmas	Menyusun regulasi yang mengatur aspek kelembagaan, tugas dan kewajiban, pembinaan dan pemberdayaan, pendanaan, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi.	Merespons mandat desentralisasi urusan ketenteraman umum; memperkuat posisi hukum Satlinmas sebagai bagian dari sistem perlindungan masyarakat di daerah.
3	Terlaksananya harmonisasi dan penjaringan aspirasi terhadap draf Pergub	Melibatkan daerah klaster dan stakeholder lintas sektor untuk memastikan draf Pergub sesuai kebutuhan lapangan dan implementatif.	Menjawab isu kurangnya partisipasi daerah dalam penyusunan regulasi provinsi; sesuai prinsip transparansi dan partisipatif dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

No.	Sasaran Program	Uraian Lengkap	Relevansi Regulasi / Isu Strategis
4	Meningkatnya pemahaman daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan Satlinmas	Melalui kegiatan sosialisasi, daerah memiliki pemahaman utuh terhadap isi, mekanisme, dan arah kebijakan Pergub tentang Satlinmas.	Menindaklanjuti amanat Permendagri 26/2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; mendukung reformasi birokrasi di tingkat daerah.
5	Terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi	Menyusun instrumen dan metodologi pemantauan implementasi Pergub, termasuk indikator keberhasilan dan pelaporan berkala.	Diperlukan untuk menjamin keberlanjutan kebijakan; sejalan dengan prinsip manajemen kinerja dan akuntabilitas program yang efektif dan efisien.

l) **Biaya Yang Diperlukan**

Sebagai bagian dari upaya mendukung program prioritas daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dan tata pemerintahan yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melalui Bidang Perlindungan Masyarakat – Seksi Data dan informasi, merancang sebuah kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) lintas kabupaten/kota.

Kegiatan ini merupakan turunan dari Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, khususnya dalam bentuk fasilitasi dan Pemberdayaan Satlinmas, sebagai salah satu ujung tombak dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Penanganan gangguan Kamtibmas tidak dapat dilakukan secara sektoral maupun parsial, melainkan harus dilaksanakan secara kolaboratif, lintas daerah, dan berbasis data serta regulasi yang kuat.

Melalui Sub Kegiatan: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, disusun strategi intervensi yang mencakup:

- Pemetaan kondisi eksisting dan tantangan pemberdayaan Satlinmas,
- Penyusunan laporan berbasis hasil pemberdayaan,
- Penyiapan dan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satlinmas sebagai dasar hukum,
- Pelaksanaan fasilitasi dan Pemberdayaan Satlinmas lintas daerah sebagai bentuk penguatan kapasitas SDM secara terpadu.

Adapun tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendorong efektivitas penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pendekatan berbasis masyarakat (*community-based approach*), dengan Satlinmas sebagai aktor pelindung yang legal, terlatih, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Dengan jumlah anggaran sebesar Rp103.464.900, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan output strategis, yaitu tersedianya laporan hasil pemberdayaan dan terbitnya regulasi daerah (Peraturan Gubernur) yang menjadi kerangka kerja legal bagi seluruh Satlinmas di Kalimantan Barat, sehingga mampu memperkuat konsistensi penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang akuntabel, berdaya, dan responsif.

PARAF HIRARKI	
Kasi Data dan Informasi	

Penanggungjawab
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat,

Marselinus Franata, S.STP., M.A.P.
Pembina/(IV/a)
NIP. 19840730 200312 1 001

Kerangka Acuan Kerja
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sasaran Program		ASN Satpol PP Povinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
	Gambaran Umum	Pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah merupakan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menghasilkan Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa

		Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
	Indikator Kinerja	Tersedianya 1 Data
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Januari s/d Desember Tahun 2026
Maksud dan Tujuan		Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Pengumpulan data statistik sektoral daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Renja Monev Penanggung jawab : Sekretaris
Jadwal		12 bulan
Biaya		Rp. 4.785.500,-

Penanggung jawab
Sekretaris

R. Dimas Rahmawan, S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 009

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Renja dan Monev

Dian Fitriani, S,Pd., M.Ak.
Penata (III/c)
NIP. 19830522 201101 2 003

Kerangka Acuan Kerja
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sasaran Program		ASN Satpol PP Povinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

	Gambaran Umum	Pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan mengundang Satpol PP Kab/Kota untuk sinergritas pelaksanaan kegiatan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menghasilkan 1 Berita Acara terkait sinergritas pelaksanaan kegiatan
	Indikator Kinerja	Tersedianya 1 Dokumen Berita Acara (BA)
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Januari s/d Desember Tahun 2026
Maksud dan Tujuan		Tersedianya BA Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Rapat dan Koordinasi bersama Satpol PP Kab/Kota dalam rangka Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Satpol PP Se-Kalbar
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Renja Monev Penanggung jawab : Sekretaris
Jadwal		12 bulan
Biaya		Rp. 26.182.300,-

Penanggung jawab
Sekretaris

R. Dimas Rahmawan, S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 009

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Renja dan Monev

Dian Fitriani, S,Pd., M.Ak.
Penata (III/c)
NIP. 19830522 201101 2 003

Kerangka Acuan Kerja
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sasaran Program		ASN Satpol PP Povinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
	Gambaran Umum	Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra dan Renja

		Perangkat Daerah di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Penysunanan dokumen renaksi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat struktur perencanaan penganggaran pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan SPM dan e-SPM Bangda. Rapat teknis supervisi evaluasi capaian pelaksanaan SPM di lingkungan Satpol PP Prov Kalbar dengan Bangda Pusat, selain itu pembinaan dan pengawasan pelaporan capain SPM kab/kota se- Kalbar.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menghasilkan Dokumen Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 Satpol PP
	Indikator Kinerja	Tersusunnya 1 Dokumen Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 Satpol PP Prov Kalbar
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Januari s/d Desember Tahun 2026
Maksud dan Tujuan		Tersusunnya dokumen capaian SPM di lingkungan Satpol PP Prov Kalbar
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Pengumpulan data SPM untuk penyusunan renaksi SPM di lingkungan Pol PP; 2. Proses Pelaporan SPM dan e-SPM secara berkala 3. Pembinaan dan pengawasan pelaporan capaian SPM di Kab/Kota
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Renja Monev Penanggung jawab : Sekretaris
Jadwal		12 bulan
Biaya		Rp. 58.904.000,-

Penanggung jawab
Sekretaris

R. Dimas Rahmawan, S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 009

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Renja dan Monev

Dian Fitriani, S,Pd., M.Ak.
Penata (III/c)
NIP. 19830522 201101 2 003

Kerangka Acuan Kerja
Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan

Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sasaran Program		ASN Satpol PP Povinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

	Gambaran Umum	Pelaksanaan sub kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan merupakan pelaksanaan kegiatan sikronisasi program dan kegiatan Satpol PP Prov Kalbar dengan Pusat untuk mendukung capaian output Nasional.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menghasilkan Dokumen Berita Acara (BA)
	Indikator Kinerja	Tersedianya 2 Dokumen Berita Acara (BA)
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Januari s/d Desember Tahun 2026
Maksud dan Tujuan		Tersedianya BA sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegitan Satpol PP Prov Klabar 2026
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Rapat dan Koordinasi Teknologi Pembangunan bersama tim Pusat dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Satpol PP Prov Kalbar
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Renja Monev Penanggung jawab : Sekretaris
Jadwal		12 bulan
Biaya		Rp. 5.566.000,-

Penanggung jawab
Sekretaris

R. Dimas Rahmawan, S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 009

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Renja dan Monev

Dian Fitriani, S,Pd., M.Ak.
Penata (III/c)
NIP. 19830522 201101 2 003

Kerangka Acuan Kerja
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sasaran Program		ASN Satpol PP Povinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah merupakan sinkronisasi perencanaan yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat baik yang secara kualitas dan kuantitas yang tertuang pada dokumen perencanaan pembanguna daerah. Merupakan penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan program, kegiatan dan dan sub kegiatan selama lima (5) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan OPD menjalankan program dan kegiatan yang tertuang menjadi dokumen Rencana

		Strategis. Selanjutnya dokumen tersebut menJadi acuan untuk melakukan perencanaan dengan menyusun rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya agar sesuai dengan pedoman dokumen strategis yang telah disusun sebelumnya.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada kegiatan menghasilkan 1 dokumen antara lain: 1. Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2027; 2. Penyusunan Dokumen Renstra 2025-2029
	Indikator Kinerja	Tersusunnya 2 Dokumen Perencanaan
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Januari s/d Agustus Tahun 2026
Maksud dan Tujuan		Tersusunnya dokumen perencanaan yang handal dalam pelaksanaan program di lingkungan Satpol PP
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Pengumpulan data rencana kerja setiap bidang dan sekretariat di lingkungan Satpol PP; 2. Penyusunan dokumen rencana kerja (Renstra dan Renja) Satpol PP
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Renja Monev Penanggung jawab : Sekretaris
Jadwal		8 bulan
Biaya		Rp. 5.976.000,-

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Renja dan Monev

Dian Fitriani, S,Pd., M.Ak.
Penata (III/c)
NIP. 19830522 201101 2 003

Penanggung jawab
Sekretaris

R. Dimas Rahmawan, S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 009

Kerangka Acuan Kerja
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sasaran Program		ASN Satpol PP Povinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD merupakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen RKA merupakan dokumen perencanaan yang memuat struktur

		perencanaan penganggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada periode berikutnya.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menghasilkan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2027;
	Indikator Kinerja	Tersusunnya 1 Dokumen RKA
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Juli s/d September Tahun 2026
Maksud dan Tujuan		Tersusunnya dokumen perencanaan yang handal dalam pelaksanaan program di lingkungan Satpol PP
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Pengumpulan data rencana kerja anggaran setiap bidang dan sekretariat di lingkungan Pol PP; 2. Proses pengentrian dalam sistem SIPD
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Renja Monev Penanggung jawab : Sekretaris
Jadwal		3 bulan
Biaya		Rp. 5.823.100,-

Penanggung jawab
Sekretaris

R. Dimas Rahmawan, S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 009

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Renja dan Monev

Dian Fitriani, S,Pd., M.Ak.
Penata (III/c)
NIP. 19830522 201101 2 003

Kerangka Acuan Kerja
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sasaran Program		ASN Satpol PP Povinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

	Gambaran Umum	Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD merupakan penyusunan dokumen PerubahanRencana Kerja Anggaran (RKA) di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen Perubahan RKA merupakan dokumen perencanaan yang memuat struktur perencanaan penganggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada periode berikutnya yang disusun setelah adanya asistensi dan verifikasi oleh Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) yang harus diperbaiki oleh Perangkat Daerah.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menghasilkan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2027 Pol PP;
	Indikator Kinerja	Tersusunnya 1 Dokumen Perubahan RKA Pol PP
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Oktober s/d November Tahun 2026
Maksud dan Tujuan		Tersusunnya dokumen perencanaan yang handal dalam pelaksanaan program di lingkungan Satpol PP
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Pengumpulan data rencana kerja anggaran setiap bidang dan sekretariat di lingkungan Pol PP; 2. Proses pengentrian dalam sistem SIPD
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Renja Monev Penanggung jawab : Sekretaris
Jadwal		2 bulan
Biaya		Rp. 4.702.500,-

Penanggung jawab
Sekretaris

R. Dimas Rahmawan, S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 009

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Renja dan Monev

Dian Fitriani, S,Pd., M.Ak.
Penata (III/c)
NIP. 19830522 201101 2 003

Kerangka Acuan Kerja
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sasaran Program		ASN Satpol PP Povinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD merupakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkungan

		Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen DPA merupakan dokumen perencanaan yang memuat struktur perencanaan penganggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada periode berikutnya yang menjadi pedoman pelaksanaan struktur pembiayaan realisasi program dan kegiatan di lingkungan Pol PP pada periode selanjutnya.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menghasilkan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2027 Pol PP;
	Indikator Kinerja	Tersusunnya 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pol PP
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan November s/d Desember Tahun 2026
Maksud dan Tujuan		Tersusunnya dokumen perencanaan yang handal dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Satpol PP
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Pengumpulan data rencana kerja anggaran setiap bidang dan sekretariat di lingkungan Pol PP; 2. Proses pengentrian dalam sistem SIPD; 3. Pengesahan Dokumen Rencana Anggaran oleh TAPD untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Renja Monev Penanggung jawab : Sekretaris
Jadwal		2 bulan
Biaya		Rp. 5.591.500,-

Penanggung jawab
Sekretaris

R. Dimas Rahmawan, S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 009

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Renja dan Monev

Dian Fitriani, S,Pd., M.Ak.
Penata (III/c)
NIP. 19830522 201101 2 003

Kerangka Acuan Kerja
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sasaran Program		ASN Satpol PP Povinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD merupakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkungan

		Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen DPA merupakan dokumen perencanaan yang memuat struktur perencanaan penganggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada periode berikutnya yang menjadi pedoman pelaksanaan struktur pembiayaan realisasi program dan kegiatan di lingkungan Pol PP pada periode selanjutnya.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menghasilkan Perubahan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 Pol PP;
	Indikator Kinerja	Tersusunnya 1 Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pol PP
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Maret s/d Oktober Tahun 2026
Maksud dan Tujuan		Tersusunnya dokumen perencanaan yang handal dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Satpol PP
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Pengumpulan data rencana kerja anggaran setiap bidang dan sekretariat di lingkungan Pol PP; 2. Proses pengentrian dalam sistem SIPD;
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Renja Monev Penanggung jawab : Sekretaris
Jadwal		8 bulan
Biaya		Rp. 5.616.000,-

Penanggung jawab
Sekretaris

R. Dimas Rahmawan, S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 009

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Renja dan Monev

Dian Fitriani, S.Pd., M.Ak.
Penata (III/c)
NIP. 19830522 201101 2 003

Kerangka Acuan Kerja
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sasaran Program		ASN Satpol PP Povinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan penyusunan dokumen evaluasi di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilakukan dalam suatu periode. Dokumen evaluasi perangkat daerah adalah dokumen laporan

		evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan Satpol PP Provinsi Kalbar selama satu periode untuk mengukur, melihat dan melaporakan dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perbaikan kebijakan dan pelaksanaan tupoksi Pol PP selanjutnya.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menghasilkan dokumen evaluasi Pol PP
	Indikator Kinerja	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja Pol PP
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Januari s/d Desember Tahun 2026
Maksud dan Tujuan		Tersusunnya dokumen evaluasi Pol PP yang handal dan akuntabel
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Pengumpulan data capaian kinerja bidang dan sekretariat di lingkungan Pol PP dalam satu periode 2. Penyusunan dokumen evaluasi per triwulan di Simdalrenbang dan e-Kinerja, serta dokumen P3DN di SIPD 3. Penyusunan Laporan Kinerja Pemprov setiap bulan dan pelaporan RUP
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Renja Monev Penanggung jawab : Sekretaris
Jadwal		12 bulan
Biaya		Rp. 5.620.000,-

Penanggung jawab
Sekretaris

R. Dimas Rahmawan, S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 009

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Renja dan Monev

Dian Fitriani, S.Pd., M.Ak.
Penata (III/c)
NIP. 19830522 201101 2 003

Kerangka Acuan Kerja
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Sasaran Program		ASN Satpol PP Povinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan penyusunan pelaporan capaian kinerja di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilakukan dalam suatu periode.

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah dokumen laporan capaian kinerja yang telah dilakukan Satpol PP Provinsi Kalbar selama satu periode untuk mengukur, melihat dan melaporakan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kontribusi pembangunan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menghasilkan dokumen laporan capaian kinerja da ikhtisar realisasi kinerja Pol PP
	Indikator Kinerja	Tersusunnya 5 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Pol PP, yaitu : LAKIP, TAPKIN, LPPD, LKPJ, SPM
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Januari s/d April Tahun 2026
Maksud dan Tujuan		Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Pol PP yang handal dan akuntabel
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Pengumpulan data capaian kinerja bidang dan sekretariat di lingkungan Pol PP dalam satu periode 2. Penyusunan laporan kinerja OPD
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Renja Monev Penanggung jawab : Sekretaris
Jadwal		4 bulan
Biaya		Rp. 6.233.000,-

Penanggung jawab
Sekretaris

R. Dimas Rahmawan, S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 009

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Renja dan Monev

Dian Fitriani, S,Pd., M.Ak.
Penata (III/c)
NIP. 19830522 201101 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA / TOR

Program		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program		Meningkatnya pemeliharaan dan pengendalian kondusifitas ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur serta Perlindungan Masyarakat
Kegiatan		Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Teraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 7. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 8. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

	Gambaran Umum	Rasa tenteram, tertib dan masyarakat yang terlindungi adalah syarat dalam menjalankan roda pemerintahan dan mencapai tujuan pembangunan. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dan aktivitasnya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kata "tenteram" bermakna aman, damai (tidak terdapat kekacauan), "tertib" bermakna sesuai dengan aturan, "teratur" bermakna rapi (disusun dengan baik). Dengan demikian, butuh sebuah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat yang fungsi utamanya untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 12 ayat (1) huruf e, Satuan Polisi Pamong Praja diamanahkan untuk melaksanakan satu di antara urusan wajib pelayanan dasar yaitu bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sementara Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di 14 kabupaten/kota berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerahnya masing-masing. Adapun tugas pokok dan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum bersinggungan pula dengan tugas-tugas dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta instansi vertikal lainnya. Termasuk tugas-tugas yang ada pada Perangkat Daerah Teknis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Perangkat Daerah Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi, mensinergikan serta menjalin kejasama dan kolaborasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum antara Satuan Polisi Pamong Praka Provinsi Kalimantan Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja di 14 kabupaten/kota, TNI, Polri, Instansi Vertikal Lainnya, Perangkat Daerah Provinsi, serta Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah efektivitas dan efisiensi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat. Disamping itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja kerap kali dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang berpotensi untuk terjadinya benturan yang berujung pada keributan antara

		Petugas dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan latar belakang dan pemahaman yang menjadi kebiasaan sehari-hari yang mana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan ujung tombak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, lalu memastikan ketenteraman dan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat. Guna mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan kegiatan deteksi dini dan cegah dini. Deteksi dini dan cegah dini adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan terkait pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta upaya dalam perlindungan masyarakat. Tujuan deteksi dini dan cegah dini adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan memberikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta upaya dalam memberikan perlindungan masyarakat. Fungsi deteksi dini dan cegah dini yaitu meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat beserta masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Selain itu, melalui deteksi dini dan cegah dini koordinasi dan sinergitas dengan Pihak terkait menjadi lebih baik.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain: 1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. 2. Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini dalam bentuk operasi deteksi dini dan cegah dini
	Indikator Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
	Batasan Kegiatan	Triwulan I – Triwulan IV Tahun Anggaran 2026

Maksud dan Tujuan	1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat **Maksud** pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi, mensinergikan serta menjalin kejasama dan kolaborasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum antara Satuan Polisi Pamong Praka Provinsi Kalimantan Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja di 14 kabupaten/kota, TNI, Polri, Instansi Vertikal Lainnya, Perangkat Daerah Provinsi, serta Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. **Tujuan** kegiatan ini adalah terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalilmantan Barat. 2. Deteksi Dini dan Cegah Dini **Maksud** pelaksanaan kegiatan ini adalah mempeloleh data dan informasi dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan Trantibum dalam pelaksanaan tugas. **Tujuan** kegiatan ini adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan memberikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan Koordinasi Trantibum dan Deteksi Dini
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kalimantan Barat
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Penanggung Jawan Kegiatan : Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat
Jadwal	Januari – Desember Tahun 2026
Biaya	Rp. 283.373.200,-

Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19820814 200604 2 009

Pelaksana Kegiatan
Plt. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini.

HARYATMIN, S.IP.
Penata Tingkat I
NIP. 19761005 199803 1 0089

KERANGKA ACUAN KERJA / TOR

Program		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program		Meningkatnya pemeliharaan dan pengendalian kondusifitas ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur serta Perlindungan Masyarakat
Kegiatan		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
Sub Kegiatan		Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; 3. Permendagri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Teraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.
	Gambaran Umum	Mengacu pada Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai Perangkat Daerah yang diberikan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan satu diantara urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini secara tersurat disebutkan dalam Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

		Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat meliputi kegiatan diantaranya pembinaan dan penyuluhan. Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat diimplementasikan melalui sub kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Pembinaan dan Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna. Pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menegakan Peraturan Daerah melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur. Pembinaan dan Penyuluhan kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk perorangan, kelompok maupun badan usaha dengan waktu pelaksanaan pembinaan dalam waktu bulanan, triwulan maupun tahunan. Hal ini dapat mencegah terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat. Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang tidak teratur disebabkan oleh perilaku tidak taat kepada hukum, norma serta kesepakatan umum sehingga mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.
	Uraian Kegiatan	Adapun sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain: 1. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur; Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka langsung *on the spot* bersama dengan instansi terkait. 2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada warga masyarakat dan Pelaku Usaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan wajib retribusi dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka langsung *on the spot* bersama dengan instansi terkait.

		3. Kegiatan dilaksanakan di Kota Pontianak.
	Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
	Batasan Kegiatan	Triwulan I – Triwulan IV Tahun Anggaran 2026
Maksud dan Tujuan		**Maksud** Meningkatnya kepatuhan serta kesadaran masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga tidak melanggar dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat. **Tujuan** kegiatan ini adalah meminimalisir terjadinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Memberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun ASN.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kalimantan Barat
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Penanggung Jawan Kegiatan : Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat
Jadwal		Januari – Desember 2026
Biaya		Rp. 75.710.000,-

Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat

EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19820814 200604 2 009

Pelaksana Kegiatan
Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

E. ELVIRA A.M., S.H., M.Kn.
Penata Tingkat I
NIP. 19821025 201101 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA / TOR

Program		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program		Meningkatnya pemeliharaan dan pengendalian kondusifitas ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur serta Perlindungan Masyarakat
Kegiatan		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
Sub Kegiatan		Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; 3. Permendagri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.
	Gambaran Umum	Esensi penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberian hak, kewajiban dan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahannya dengan seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagaimana kehendak dan kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 urusan yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Adapun wujud dari implementasi otonomi daerah ini adalah Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakannya sendiri berupa Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA).

		Mengacu pada Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai Perangkat Daerah yang diberikan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan satu di antara urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini secara tersurat disebutkan dalam Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Secara filosofis keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikatakan sebagai "mata" dan "tangan kanan" Kepala Daerah. Anggapan ini tidak berlebihan mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dijelaskan di atas. Sebagai mata, Satuan Polisi Pamong Praja berperan untuk melakukan pengawasan atas pelanggaran terhadap kebijakan Kepala Daerah berupa Perda dan Perkada. Kemudian sebagai tangan kanan, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Perangkat Daerah yang digunakan untuk memastikan terlaksananya kebijakan Kepala Daerah berupa penegakan hukum atas pelanggaran Perda dan Perkada. Upaya ini untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah dapat terealisasi/terlaksana dengan baik sehingga terwujud masyarakat yang tentram, tertib dan teratur serta terlindungi. Kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat di implementasikan melalui sub kegiatan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Sub kegiatan sosialisasi merupakan penyebarluasan informasi mengenai isi atau substansi dari Perda dan Pergub sebagai produk kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuannya adalah memberikan edukasi dan pemahaman agar terwujudnya kesadaran masyarakat sekaligus mendapatkan umpan balik atas kebijakan yang ada. Pada Tahun Anggaran 2026, sub kegiatan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur akan difokuskan pada Peraturan Daaerah yang ada ketentuan sanksi sebanyak 48 Perda.

Kegiatan	Uraian Kegiatan	Adapun sub kegiatan sosialisasi penegakan Perda dan Pergub akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain: 1. Sosialisasi Peraturan Daerah dengan sasaran kegiatan: a. Siswa Sekolah Menengah Atas dan Mahasiswa dimana para siswa dan mahasiswa sebagai *agent of change* di masyarakat melalui kegiatan *Satpol PP goes to School* dan *Satpol PP goes to Campus.* Kegiatan ini direncanakan secara tatap muka di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang; b. Masyarakat, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yaitu tatap muka langsung ***on the spot*** bersama instansi terkait dan virtual dengan fasilitas teknologi informasi. 2. Sosalisasi penegakan Perda dan Perkada menggunakan media cetak berupa brosur, spanduk, banner dan majalah serta sosialisasi melalui media elektronik yaitu melalui media sosial IG dan FB.
	Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
	Batasan Kegiatan	Triwulan I – Triwulan IV Tahun Anggaran 2026
Maksud dan Tujuan		**Maksud** pelaksanaan kegiatan ini adalah menyebarluaskan informasi tentang substansi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur. **Tujuan** kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kepatuhan serta kesadaran masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun ASN
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kalimantan Barat
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Penanggung Jawan Kegiatan : Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat

Jadwal	Januari – Desember 2026
Biaya	Rp. 271.508.000,-

Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat

EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19820814 200604 2 009

Pelaksana Kegiatan
Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan,

E. ELVIRA A.M., S.H., M.Kn.
Penata Tingkat I
NIP. 19821025 201101 2 003

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

KEGIATAN PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN
TAHUN 2026

SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR

TAHUN 2025

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)
KEGIATAN PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

Program		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program		Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi
Latar Belakang	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8

		Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9); d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 6); e. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis Pengamanan Kantor, Gedung dan Rumah Pejabat di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 14); f. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 60). g. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);

		h. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 454 / SATPOL.PP / 2023 tentang Kriteria Operasi/Kegiatan dan Bantuan Operasional di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026
	Gambaran Umum	Pamong Praja atau lebih dikenal dengan nama Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) memiliki tugas yang penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. sekilas mirip dengan Polisi Republik Indonesia (Polri), tapi Satpol PP memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Apabila Polri bergerak di bawah kewenangan presiden dan wakil presiden, maka Satpol PP bergerak di bawah kewenangan gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018, Satpol PP Memiliki Tugas Menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Perkada.

		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi: Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP mempunyai fungsi: a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait; d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	a. Deteksi dan cegah dini; b. Pembinaan dan penyuluhan; c. Patroli; d. Pengamanan;

		e. Pengawalan; f. Penertiban; dan g. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
	Indikator Kinerja	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
	Batasan Kegiatan	Kegiatan Dilaksanakan Di Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa di Provinsi Kalimantan Barat
Maksud dan Tujuan		Maksud dilaksanakannya Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah agar menciptakan kondisi wilayah menjadi aman, kondusif dan terawasi dengan baik sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Mendukung pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

	b. Mendukung terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. Mendukung pengawalan pejabat dan orang-orang penting; d. Mendukung Pengamanan tempat-tempat penting (lokasi kunjungan kerja dan/atau kegiatan, tempat kedatangan, tujuan dan/atau kegiatan, gedung dan aset Pemerintah Provinsi serta upacara dan acara penting); e. Melaksanakan patroli sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi; f. Mendukung pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini; g. Melaksanakan operasi/kegiatan lainnya.
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Waktu pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan di Kalimantan Barat Tahun 2026 adalah bulan Januari – Desember 2026.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan di Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat akan dilaksanakan di tempat/lokasi yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan

	di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Surat Tugas (ST) dan memperhatikan kemampuan pendanaan dan alokasi anggaran yang disediakan.
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Selaku PPTK dan di bantu Kasi Operasional dan Pengendalian.
Jadwal	Januari sampai dengan Desember 2026
Biaya	Sumber pembiayaan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **800.135.000,00** *(Delapan Ratus Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).*

Pontianak, Juli 2025

Kepala Seksi
Operasional dan Pengendalian,

RUBIYANTO, S.STP.
Penata Tingkat I
NIP. 19881125 201010 1 001

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman,

ISMEP HARDINATA, S.Pi, ME
Pembina Tingkat I
NIP. 19741104 200604 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

KEGIATAN PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

TAHUN 2026

SEKSI KETERTIBAN UMUM
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR

TAHUN 2025

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)
KEGIATAN PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

Program		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program		Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas Provinsi Kalimantan Barat
Kegiatan		Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertibkan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
Latar Belakang	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

		Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9); d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 6); e. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis Pengamanan Kantor, Gedung dan Rumah Pejabat di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 14); f. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 60). g. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); h. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 454 / SATPOL.PP / 2023 tentang Kriteria Operasi/Kegiatan dan Bantuan Operasional di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

		i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026
	Gambaran Umum	Pamong Praja atau lebih dikenal dengan nama Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) memiliki tugas yang penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. sekilas mirip dengan Polisi Republik Indonesia (Polri), tapi Satpol PP memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Apabila Polri bergerak di bawah kewenangan presiden dan wakil presiden, maka Satpol PP bergerak di bawah kewenangan gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018, Satpol PP Memiliki Tugas Menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Perkada. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi: Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP mempunyai fungsi:

		a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait; d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	a. Deteksi dan cegah dini; b. Pembinaan dan penyuluhan; c. Patroli; d. Pengamanan; e. Pengawalan; f. Penertiban; dan g. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
	Indikator Kinerja	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa
	Batasan Kegiatan	Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat

Maksud dan Tujuan	Maksud dilaksanakannya Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah agar menciptakan kondisi wilayah menjadi aman, kondusif dan terawasi dengan baik sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: a. Mendukung pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; b. Mendukung terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. Mendukung pengawalan pejabat dan orang-orang penting; d. Mendukung Pengamanan tempat-tempat penting (lokasi kunjungan kerja dan/atau kegiatan, tempat kedatangan, tujuan dan/atau kegiatan, gedung dan aset Pemerintah Provinsi serta upacara dan acara penting); e. Melaksanakan patroli sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi; f. Mendukung pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini; g. Melaksanakan operasi/kegiatan lainnya.

Cara Pelaksanaan Kegiatan	Untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten/Kota, metode yang dilaksanakan adalah : 1. Pembinaan secara mandiri/diinisiasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat ke insitusi/SKPD penyelenggara tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan pertemuan/rapat dengan para perwakilan SKPD penyelenggara tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten/Kota di setiap semester. 3. Menjalin kerjasama dengan SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Selaku PPTK dan di Bantu Kasi Ketertiban Umum
Jadwal	Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat adalah dari bulan Januari – Desember 2026.
Biaya	Sumber pembiayaan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

	Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 78.021.000,00** *(Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).*

Pontianak, Juli 2025

Kepala Seksi
Ketertiban Umum,

M. ISKANDAR, S.STP., M.A.P
Penata
NIP. 19910429 201507 1 001

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman,

ISMEP HARDINATA, S.Pi, ME
Pembina Tingkat I
NIP. 19741104 200604 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA / TOR

Program		PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan		Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

	Gambaran Umum	Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai Perangkat Daerah yang diberikan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan satu diantara urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Amanat tersebut di atas tercantum dalam Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib, maka diwajibkan pula untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya sebagaimana yang tlah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	1. Memberikan pelayanan ganti rugi materiil kepada masyarakat akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada 2. Memberikan pelayanan pengobatan kepada masyarakat akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada
	Indikator Kinerja	Jumlah laporan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani
	Batasan Kegiatan	Bulan Januari - Desember Tahun 2026
Maksud dan Tujuan Kegiatan		Maksud kegiatan ini adalah : memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak akibat penegakan Perda dan Perkada Tujuan kegiatan ini adalah : sebagai pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara Indonesia secara minimal.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Memberikan pelayanan ganti rugi materiil 2. Memberikan pelayanan pengobatan

Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Penegakan Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Jadwal	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2026
Biaya	Rp. 9.747.000,-

Pontianak, 4 Juli 2025

Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

Eddy Karmilan, S.H., M.E.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19690501 199803 1 008

Pelaksana Kegiatan
Kepala Seksi Penegakan,

Marbun, S.Sos
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19750811 200502 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA / TOR

PROGRAM		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
KEGIATAN		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
SUB KEGIATAN		Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat; 9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Gambaran Umum	Peraturan Daerah merupakan peraturan yang memuat ciri khas setiap daerah serta penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah

		memuat ketentuan sanksi administratif serta sanksi pidana berupa kurungan dan denda yang dimaksudkan agar Peraturan Daerah tersebut memiliki sanksi bagi setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka optimalisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu peningkatan kualitas dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kalimantan Barat melalui koordinasi antar PPNS pada Sekretariat PPNS Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 pada Pasal 8 menyatakan bahwa dalam melaksanakan penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja bertindak selaku Koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Keberadaan Sekretariat PPNS merupakan wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS baik yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja maupun yang berada di masing-masing perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS perlu peningkatan sinergitas antar PPNS lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam membangun kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan guna menciptakan kondisi daerah yang kondusif, ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. Optimalisasi kinerja PPNS menjadi penting dan bernilai strategis bila dikorelasikan dengan kenyataan bahwa perilaku sebagian masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah, pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan kebijakan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku serta perilaku sosial sebagian warga masyarakat yang tidak sesuai norma sosial dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib di Kalimantan Barat.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	1. Dukungan kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Sekretariat PPNS. 2. Penyusunan rencana pelaksanaan dan strategi pencapaian kegiatan. 3. Pengelolaan arsip dan dokumentasi. 4. Kegiatan dukungan operasional lainnya sesuai kebutuhan.
	Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS
	Batasan Kegiatan	Januari – Desember 2026
Maksud dan Tujuan Kegiatan		Maksud : Terlaksananya operasional PPNS dalam Penegakkan Perda

	Provinsi Kalbar secara non yustisi atau pro yustisi. Tujuan : Mengoptimalkan kinerja dan operasional PPNS dalam menegakkan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Penyediaan sarana prasarana alat tulis kantor, pengelolaan laporan, pelaksanaan rapat, pengelolaan arsip, koordinasi, dan dukungan operasional sesuai dengan kebutuhan Sekretariat PPNS.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat
Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Jadwal	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2026
Biaya	Rp. 37.451.000,-

Pontianak, 4 Juli 2025

Penanggung Jawab Kegiatan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pelaksana Kegiatan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
Eddy Kamilan, S.H., M.E. Pembina Tingkat I / IV.b NIP 19690501 159803 1 008	Widodo Juliarto, S.H. Penata Tingkat I / III.d NIP. 19710709 200502 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA / TOR

PROGRAM		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
KEGIATAN		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
SUB KEGIATAN		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Gambaran Umum	Secara hirarki kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat

		(1) huruf e yang menegaskan bahwa ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar serta Pasal 255 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Penegakan Perda dan Pergub merupakan aspek penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. Namun, pelaksanaan penegakan Perda dan Pergub seringkali dihadapkan pada kompleksitas permasalahan yang melibatkan berbagai pihak serta kebutuhan akan sumber daya dan koordinasi yang efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kerja sama antar perangkat daerah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta serta pembentukan kemitraan menjadi solusi penting dalam memperkuat penegakan Perda dan Pergub. Ini tidak hanya membantu dalam pertukaran informasi dan sumber daya, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi Perda dan Pergub. Pola kerja sama dan kemitraan dalam penegakan Perda dan Pergub menjadi langkah strategis untuk mencapai ketenteraman, ketertiban umum yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat menjadi model untuk dilaksanakan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	1. Melakukan sinergitas antar lembaga pemerintah di daerah dalam rangka Penegakkan Hukum Perda dan Pergub. 2. Mengoptimalkan penegakkan hukum Perda dan Pergub. 3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Penegakan Perda dan Pergub
	Indikator Kinerja	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan Perda
	Batasan Kegiatan	Januari - Desember 2026
Maksud dan Tujuan Kegiatan		Maksud : Terjalinnya kerjasama dan hubungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan perangkat daerah dan instansi/lembaga terkait sebagai wujud pola kemitraan dan saling menghormati sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Tujuan : Mengoptimalkan peran PPNS dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan perangkat daerah, instansi/lembaga dan kemitraan lain dalam melaksanakan penegakan Perda dan Pergub di Provinsi Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Menyelenggarakan pertemuan dalam rangka menjalin koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah dan lembaga/instansi terkait dengan mengikutsertakan peran dari : 1. Aparatur penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan. 2. Perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

	3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Jadwal	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2026
Biaya	Rp. 52.482.600,-

Pontianak, 4 Juli 2025

Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah

Eddy Karmilan, S.H., M.E.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP 19690501 159803 1 008

Pelaksana Kegiatan
Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga

Widodo Juliarto, S.H.
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19710708 200502 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA / TOR

PROGRAM		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
KEGIATAN		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
SUB KEGIATAN		Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat; 9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

		Provinsi Kalimantan Barat.
	Gambaran Umum	Guna meningkatkan profesionalitas PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam menunjang pelaksanaan proses penyidikan, diperlukan tata cara pemberkasan administrasi penyidikan yang tertata dan terkelola secara. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Dalam menjalankan tugasnya, pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS menjadi krusial. Hal ini penting karena: 1. Transparansi dan Akuntabilitas**.** Pemberkasan memastikan tindakan PPNS terdokumentasi, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas. 2. Efisiensi Penyidikan**.** Sistem pemberkasan yang baik mempercepat penanganan kasus pelanggaran. 3. Perlindungan Hak Individu Pemberkasan menjaga hak individu yang terlibat dalam penyidikan. 4. Pengambilan Keputusan Dokumen yang tertib mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. 5. Peningkatan Penegakan Hukum Sistem yang efektif meningkatkan kualitas penegakan hukum oleh PPNS.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	1. Pendokumentasian informasi yang meliputi membuat catatan dan dokumen terkait data pelanggaran. 2. Penyusunan Berkas Perkara sesuai ketentuan yang berlaku**.** 3. Pengkajian dan analisis hukum dalam rangka memeriksa keabsahan bukti dan kesesuaian tindakan dengan ketentuan yang berlaku. 4. Pemantauan dan Pemeliharaan Berkas. 5. Pengarsipan dan Pelaporan.
	Indikator Kinerja	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda
	Batasan Kegiatan	Januari – Desember 2026
Maksud dan Tujuan Kegiatan		Maksud **:** Terciptanya pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi Kalbar secara non yustisi atau pro yustisi oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan **:** Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan aparatur, masyarakat/badan usaha dan sekaligus sebagai edukasi positif dalam menyikapi Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Penyediaan sarana prasarana alat tulis kantor, pengelolaan

	laporan, pelaksanaan rapat, pengelolaan arsip, koordinasi, dan dukungan operasional sesuai dengan kebutuhan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten/Kota, Se Kalimantan Barat
Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Jadwal	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2026
Biaya	Rp. 35.343.100,-

Pontianak, 4 Juli 2025

Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah

Eddy Karmilan, S.H., M.E.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP 19690501 159803 1 008

Pelaksana Kegiatan
Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga

Widodo Juliarto S.H.
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19710709 200502 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA / TOR

Program		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program		Prosentase masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
Kegiatan		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
Sub Kegiatan		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daeran dan Peraturan Gubernur
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

		dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Gambaran Umum	Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai Perangkat Daerah yang diberikan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan satu diantara urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban non yustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada, dan tindakan administratif. Kewenangan yang cukup besar tersebut semestinya dapat dimaksimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Namun pada kenyataannya, masih terdapat tugas dan kewenangan selaku penegak Perda dan/atau Perkada perlu semakin dioptimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Disamping itu, dalam berhadapan dengan sekelompok masyarakat perlu dikedepankan pendekatan atau cara-cara yang persuasif dan humanis agar tidak menimbulkan konflik dan kegaduhan di masyarakat. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur melalui sub kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap aktivitas kegiatan masyarakat, pelaku usaha yang diduga melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 2. melaksanakan tindak lanjut pengaduan terhadap aktivitas kegiatan usaha, masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 3. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait dalam menangani aktivitas masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.
	Indikator Kinerja	Prosentase Perda / Perkada yang ditegakkan
	Batasan Kegiatan	Januari – Desember 2026

Maksud dan Tujuan Kegiatan	Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan tindakan terhadap pelanggar Perda atau Peraturan Gubernur yang sifatnya represif non yustisi dalam rangka menciptakan suasana yang aman, tertib dan tenteram di masyarakat yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak dengan tujuan akhir agar program-program pemerintah bisa terlaksana dengan baik guna terwujudnya roda pemerintahan dan pembangunan serta kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terciptanya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan yang diatur dalam Perda dan Peraturan Gubernur agar tingkat pelanggaran dapat diminimalisir dan menimbulkan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara terhadap hak dan kewajibannya, sehingga di masa mendatang tidak terjadi lagi bentuk – bentuk pelanggaran Perda dan Peraturan Gubernur yang menimbulkan kerugian dan bisa menghambat pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Melakukan Tindakan Non Yustisi
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Penegakan Penanggung Jawan Kegiatan : Kepala Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
Jadwal	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2026
Biaya	Rp. Rp. 160.197.600,-

Pontianak, 4 Juli 2025

Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah

Eddy Karmilan, S.H, M.E
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19690501 199803 1 008

Pelaksana Kegiatan
Kepala Seksi Penegakan

Marbun, S.Sos
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19750811 200502 1 002

.

KERANGKA ACUAN KERJA / TOR

PROGRAM		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
KEGIATAN		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
SUB KEGIATAN		Pengawasan Atas Kepatuhan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

		Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Gambaran Umum	Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perangkat daerah yang diberikan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan satu diantara urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban non yustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada, dan tindakan administratif. Terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama-sama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat wajib dilaksanakan oleh perangkat daerah (Dinas/Badan) pengampu Peraturan Daerah dimaksud sehingga perlu dilakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur agar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut dapat berjalan efektif dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. 2. Melakukan pengawasan, pengamatan, pencarian pengumpulan bahan keterangan terhadap dugaan pelanggaran produk hukum daerah Provinsi Kalimantan Barat. 3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait, badan hukum, Perangkat Daerah dan aparatur terkait pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
	Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan

		Daerah dan Peraturan Gubernur.
	Batasan Kegiatan	Januari – Desember 2026
Maksud dan Tujuan Kegiatan		Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan Pergub yang telah ditetapkan sehingga penerapannya dapat berjalan dengan baik. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatnya kepatuhan masyarakat, badan hukum dan ASN terhadap implementasi pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Melaksanakan patroli pengawasan. 2. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat
Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Penegakan Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Jadwal		Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2026
Biaya		Rp. 564.242.760,-

Pontianak, 4 Juli 2025

Penanggung Jawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kepala Seksi Penegakan
Eddy Karmilan, S.H., M.E.	Marbun, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV.b	Penata Tingkat I / III.d
NIP 19690501 159803 1 008	NIP. 19750811 200502 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA / TOR

PROGRAM		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
KEGIATAN		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
SUB KEGIATAN		Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; 10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang

		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Gambaran Umum	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur merupakan langkah penting dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di suatu daerah. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat merugikan masyarakat, mengganggu ketertiban umum dan merusak prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, terdapat beberapa latar belakang yang perlu diperhatikan: 1. Perlunya Kepatuhan Terhadap Hukum Kepatuhan terhadap hukum, termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, adalah pondasi utama dari sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Penyelidikan dugaan pelanggaran menjadi langkah penting untuk menjamin bahwa aturan hukum dihormati oleh semua pihak. 2. Perlindungan Masyarakat Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat. Melalui penyelidikan, potensi bahaya dan pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat dapat diidentifikasi dan diatasi. 3. Keterbukaan dan Akuntabilitas Proses penyelidikan membantu menciptakan keterbukaan dalam tindakan pemerintah. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aturan diterapkan dan bagaimana pelanggaran hukum ditangani. Akuntabilitas pemerintah juga terjaga melalui proses penyelidikan yang adil dan transparan. 4. Ketertiban dan Keharmonisan Penegakan hukum yang konsisten dan adil membantu menjaga ketertiban di masyarakat. Ini berkontribusi pada keharmonisan dan stabilitas daerah atau provinsi. 5. Dampak Negatif Pelanggaran Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti kerugian finansial, kerusakan lingkungan, atau gangguan terhadap ketertiban umum. 6. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran kunci dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di daerah. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, mengambil tindakan penegakan hukum dan memastikan ketaatan terhadap regulasi hukum di daerah. Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelidikan penting untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Kegiatan	Uraian Kegiatan	1. Identifikasi kasus dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. 2. Pengumpulan informasi melalui berbagai sumber termasuk dokumen resmi, catatan, dan saksi-saksi terkait. 3. Pemeriksaan lapangan untuk mendapatkan bukti lebih lanjut. 4. Wawancara dengan saksi-saksi terkait. 5. Analisis bukti dan data yang terkumpul. 6. Penyusunan laporan penyelidikan dengan rekomendasi tindakan lanjutan. 7. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait, badan hukum, Perangkat Daerah dan aparatur terkait pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
	Indikator Kinerja	Jumlah Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
	Batasan Kegiatan	Januari – Desember 2026
Maksud dan Tujuan Kegiatan		Maksud : Tercapainya investigasi dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengumpulkan bukti terkait dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, guna mendukung proses penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melakukan Penyelidikan (pengawasan, pengamatan, pengumpulan bahan keterangan/wasmatpulbaket) dengan cara identifikasi, dan pengumpulan barang bukti dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat.
Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Penegakan Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Jadwal	Triwulan I – Triwulan IV Tahun 2026
Biaya	Rp. 50.139.000,-

Pontianak, 4 Juli 2025

Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah

Eddy Karmilan, S.H., M.E.
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP 19690501 159803 1 008

Pelaksana Kegiatan
Kepala Seksi Penegakan

Marbun, S.Sos
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19750811 200502 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program		ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7); 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 7. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

		Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Nomor 96);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dimaksudkan agar tersedia instalasi litrik/penerangan bangunan kantor sehingga terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik dan lancar.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menyediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Indikator Kinerja	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan paket pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Januari sampai dengan Desember 2026
Maksud dan Tujuan		Tersedianya jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1.Penyusunan PO dan KAK 2.Pelaksananaan Pembayaran Kegiatan 3.Penyelesaian Administrasi Kegiatan
Tempal Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penaggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Umum dan Aparatur Penanggung Jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Jadwal		12 Bulan
Biaya		Rp. 119.904.000,00

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
Pembina / (IVa)
NIP. 19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Umum dan Aparatur

Maria Fransiska Agustini, SE
Penata Tk. I / (III/d)
NIP. 19840824 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program		ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7); 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 7. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Nomor 96);

	Gambaran Umum	Pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pendukung yang dapat menunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya jasa layanan umum kantor penyelenggaraan pekerjaan kantor akan lebih baik.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menyediakan jumlah paket bahan logistik kantor pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Indikator Kinerja	Jumlah laporan jasa pelayanan umum yang disediakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Januari sampai dengan Desember 2026
Maksud dan Tujuan		Tersedianya Jumlah laporan jasa pelayanan umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang akurat dan akuntabel.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Penyusunan PO dan KAK 2. Pelaksananaan Pembayaran Kegiatan 3. Penyelesaian Administrasi Kegiatan
Tempal Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penaggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Umum dan Aparatur Penanggung Jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Jadwal		12 Bulan
Biaya		Rp. 159.224.000,00

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
Pembina / (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Umum dan Aparatur

Maria Fransiska Agustini, SE
Penata Tk. I / (III/d)
NIP. 19840824 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program		ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Latar Belakang	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7); 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 7. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Nomor 96);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan peralatan penunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor perlu diarahkan secara baik sehingga mampu memberikan keluaran berupa ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor bahan kerja yang memadai.

Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menyediakan jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Indikator Kinerja	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Januari sampai dengan Desember 2026
Maksud dan Tujuan		Tersedianya jumlah paket peralatan dan perlengkapan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Penyusunan PO dan KAK; 2. Pelaksanaan pembayaran kegiatan; 3. Penyelesaian administrasi kegiatan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan		Pelaksana kegiatan : Kasubbag Umum dan Aparatur Penanggungjawab: Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Jadwal		12 Bulan
Biaya		Rp. 35.587.700,00

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
Pembina/(IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Umum dan Aparatur,

Maria Fransiska Agustini, SE
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 19840824 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program		ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7); 8. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

		Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 9. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Nomor 96);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah untuk mengembangkan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) ASN Pol PP Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini memfasilitasi ASN berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
	Indikator Kinerja	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Januari sampai dengan Desember 2026
Maksud dan Tujuan		Terfasilitasinya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Pengumpulan data ASN berdasarkan tugas dan fungsi 2. Tersusunnya data ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis berdasarkan tugas dan fungsi 3. Pengiriman ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis berdasarkan tugas dan fungsi
Tempal Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penaggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Umum dan Aparatur Penanggung Jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Jadwal		12 Bulan
Biaya		Rp. 105.000.000,00

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
Pembina / (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Umum dan Aparatur

Maria Fransiska Agustini, SE
Penata Tk. I / (III/d)
NIP. 19840824 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program		ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipii Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

		8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7); 10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 11. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Nomor 96);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD merupakan koordinasi dan konsultasi ke SKPD/Instansi lain baik dalam maupun luar Provinsi dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD maka penyelenggaraan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menghasilkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Indikator Kinerja	Tersusunnya dokumen Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Januari sampai dengan Desember 2026
Maksud dan Tujuan		Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan baik
Tempal Pelaksanaan Kegiatan		Provinsi Kalimantan Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Pelaksana & Penaggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Umum dan Aparatur Penanggung Jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Jadwal	12 Bulan
Biaya	Rp. 266.821.699,99

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
Pembina / (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Umum dan Aparatur

Maria Fransiska Agustini, SE
Penata Tk. I / (III/d)
NIP. 19840824 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program		ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipii Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

		7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7); 10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 11. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Nomor 96);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan Pendataan dan pengolahan administrasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan berdasarkan pada syarat jabatan dan syarat kompetensi jabatan yang diperoleh dengan optimalisasi manajemen kepegawaian dari perencanaan kebutuhan ASN, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian. penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi terhadap kenaikan pangkat, jabatan, mutasi, pendidikan dinas, penindakan. berhenti dan pensiun dengan dukungan informasi jabatan yang komprehensif, guna mewujudkan target analis jabatan dan analis beban kerja serta peta jabatan yang baik dan relevan

		dengan pendataan dan pengolahan administrasi pegawai.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menghasilkan dokumen laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepeqawaian Pada Satuan Kela Perangkat Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Indikator Kinerja	Tersusunnya Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian untuk ASN Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Januari sampai dengan Desember 2026
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Pengumputan data dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat 2. Tersusunnya perencanaan kebutuhan ASN, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan. serta laporan terhadap kenaikan pangkat, jabatan, mutasi, pendidikan dinas, penindakan, berhenti dan pensiun 3. Tersusunnya analis jabatan dan analis beban kerja serta peta jabatan.
Tempal Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penaggung Jawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Umum dan Aparatur Penanggung Jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Jadwal		12 Bulan
Biaya		Rp. 33.089.500,00

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
Pembina / (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Umum dan Aparatur

Maria Fransiska Agustini, SE
Penata Tk. I / (III/d)
NIP. 19840824 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program		ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);

		8. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 9. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Nomor 96);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan Sub Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD adalah suatu sistem penyimpanan arsip yang dapat mudah untuk ditemukan secara cepat dan tepat, oleh karena itu pengelolaan arsip yang efektif dan sistematis sangat diperlukan, karena sistem penyimpanan arsip sangat berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip dan penemuan kembali. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pusat informasi Provinsi Kalimatan Barat dan bertugas melayani kepentingan umum dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat. Dengan pengelolaan arsip yang tepat maka akan tercipta suatu mekanisme kearsipan dengan baik, mulai dari penciptaannya, penerimaan, penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan sampai penyusutannya sehigga teripta sebuah pelayanan arsip yang optimal.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menghasilkan dokumen laporan Pendataan Arsip Dinamis pada SKPD pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Indikator Kinerja	Tersusunnya Laporan dokumen Pendataan Arsip Dinamis pada SKPD pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Januari sampai dengan Desember 2026
Maksud dan Tujuan		Tersusunnya dokumen Laporan Pendataan Arsip Dinamis pada SKPD pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang akurat dan akuntabel.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Pengelolaan dimulai dari, penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, serta penyusutan arsip di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. 2. Menghimpun informasi, mencatat dan mengklarifikasikan informasi, menginterpretasikan informasi, mengolah informasi, unutk akuntabilitas dan auditing, menyimpan dan mengambl kembali informasi dari tempat penyimpanan,

	mendistribusikan informasi dan ketepatan penggunaan informasi.
Tempal Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penaggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Umum dan Aparatur Penanggung Jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Jadwal	12 Bulan
Biaya	Rp. 29.155.000,00

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
Pembina / (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Umum dan Aparatur

Maria Fransiska Agustini, SE
Penata Tk. I / (III/d)
NIP. 19840824 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program		ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7); 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);

		7. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Nomor 96);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan merupakan suatu kebutuhan yang harus disediakan oleh kantor guna meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan informasi guna meningkatkan penyelenggaraan administrasi perkantoran.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menyediakan jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Indikator Kinerja	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Januari sampai dengan Desember 2026
Maksud dan Tujuan		Tersedianya jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Penyusunan PO dan KAK 2. Pelaksananaan Pembayaran Kegiatan 3. Penyelesaian Administrasi Kegiatan
Tempal Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penaggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Umum dan Aparatur Penanggung Jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Jadwal		12 Bulan
Biaya		Rp. 5.400.000,00

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
Pembina / (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Umum dan Aparatur

Maria Fransiska Agustini, SE
Penata Tk. I / (III/d)
NIP. 19840824 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program		ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7); 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 7. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

		Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Nomor 96);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah untuk memenuhi kebutuhan kantor berupa alat kebersihan dan sarana lainnya sehingga meningkatkan kenyamanan kantor untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menyediakan jumlah paket peralatan rumah tangga pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Indikator Kinerja	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Januari sampai dengan Desember 2026
Maksud dan Tujuan		Tersedianya jumlah paket peralatan rumah tangga pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Penyusunan PO dan KAK 2. Pelaksananaan Pembayaran Kegiatan 3. Penyelesaian Administrasi Kegiatan
Tempal Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penaggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Umum dan Aparatur Penanggung Jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Jadwal		12 Bulan
Biaya		Rp. 39.544.000,00

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
Pembina / (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Umum dan Aparatur

Maria Fransiska Agustini, SE
Penata Tk. I / (III/d)
NIP. 19840824 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/

PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program		ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7); 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);

		7. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Nomor 96);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dimaksudkan agar tersedia komponen instalasi litrik/penerangan bangunan kantor sehingga terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik dan lancar.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menyediakan jumlah paket komponen instalasi litrik/penerangan bangunan kantor pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Indikator Kinerja	jumlah paket komponen instalasi litrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Januari sampai dengan Desember 2026
Maksud dan Tujuan		Tersedianya jumlah paket komponen instalasi litrik/penerangan bangunan kantor pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Penyusunan PO dan KAK 2. Pelaksananaan Pembayaran Kegiatan 3. Penyelesaian Administrasi Kegiatan
Tempal Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penaggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Umum dan Aparatur Penanggung Jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Jadwal		12 Bulan
Biaya		Rp. 7.609.000,00

Penanggung Jawab
Sekretaris

R. Dimas Rahmawan, SH
Pembina / (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Umum dan Aparatur

Maria Fransiska Agustini, SE
Penata Tk. I / (III/d)
NIP. 19840824 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program		ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7); 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 7. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

		Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Nomor 96);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan merupakan peralatan penunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya barang cetakan dan penggandaan penyelenggaraan pekerjaan kantor akan lebih baik.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menyediakan jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Indikator Kinerja	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Januari sampai dengan Desember 2026
Maksud dan Tujuan		Tersedianya jumlah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Penyusunan PO dan KAK 2. Pelaksananaan Pembayaran Kegiatan 3. Penyelesaian Administrasi Kegiatan
Tempal Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penaggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Umum dan Aparatur Penanggung Jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Jadwal		12 Bulan
Biaya		Rp. 28.796.000,00

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
Pembina / (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Umum dan Aparatur

Maria Fransiska Agustini, SE
Penata Tk. I / (III/d)
NIP. 19840824 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program		ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7); 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 7. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

		(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Nomor 96);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor merupakan sarana prasarana pendukung yang dapat menunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya bahan logistic kantor penyelenggaraan pekerjaan kantor akan lebih baik.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menyediakan jumlah paket bahan logistik kantor pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Indikator Kinerja	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Januari sampai dengan Desember 2026
Maksud dan Tujuan		Tersedianya Jumlah paket bahan logistik kantor pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang akurat dan akuntabel.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Penyusunan PO dan KAK 2. Pelaksananaan Pembayaran Kegiatan 3. Penyelesaian Administrasi Kegiatan
Tempal Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penaggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Umum dan Aparatur Penanggung Jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Jadwal		12 Bulan
Biaya		Rp. 204.876.000,00

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
Pembina / (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Umum dan Aparatur

Maria Fransiska Agustini, SE
Penata Tk. I / (III/d)
NIP. 19840824 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program		ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Fasilitasi Kunjungan Tamu
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7); 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 7. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

		(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Nomor 96);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dimaksudkan agar terpenuhinya kebutuhan fasilitas makan minum tamu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menghasilkan dokumen laporan fasilitasi kunjungan tamu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Indikator Kinerja	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Januari sampai dengan Desember 2026
Maksud dan Tujuan		Tersusunnya jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Penyusunan PO dan KAK 2. Pelaksananaan Pembayaran Kegiatan 3. Penyelesaian Administrasi Kegiatan 4. Penyusunan Laporan
Tempal Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penaggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Umum dan Aparatur Penanggung Jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Jadwal		12 Bulan
Biaya		Rp. 6.000.000,00

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
Pembina I / (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Umum dan Aparatur

Maria Fransiska Agustini, SE
Penata Tk. I / (III/d)
NIP. 19840824 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program		ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat
Sub Kegiatan		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78); 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7); 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71); 7. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

		(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, Nomor 96);
	Gambaran Umum	Pelaksanaan Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sehingga terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik dan lancar.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pada sub kegiatan ini menyediakan jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Indikator Kinerja	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
	Batasan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Januari sampai dengan Desember 2026
Maksud dan Tujuan		Tersedianya jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan kantor pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		1. Penyusunan PO dan KAK 2. Pelaksananaan Pembayaran Kegiatan 3. Penyelesaian Administrasi Kegiatan
Tempal Pelaksanaan Kegiatan		Pontianak-Kalbar
Pelaksana & Penaggungjawab Kegiatan		Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Umum dan Aparatur Penanggung Jawab : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
Jadwal		12 Bulan
Biaya		Rp.227.400.000,00

Penanggung Jawab
Sekretaris,

R. Dimas Rahmawan, SH
Pembina I (IV/a)
NIP. 19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Umum dan Aparatur

Maria Fransiska Agustini, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840824 201001 2 019